

## BAB 5

### GERAKAN MAHASISWA DAN DUKUNGAN ELIT POLITIK PADA MASA B.J. HABIBIE DAN ABDURRAHMAN WAHID

Bab ini 5 berisi pembahasan tentang tiga hal pokok, yaitu: (1) strategi gerakan mahasiswa; (2) gerakan mahasiswa dan peran elit politik di dalamnya; (3) kepentingan elit politik dan respon gerakan mahasiswa. Selain itu bab ini juga membahas alasan gerakan mahasiswa dalam bekerjasama dengan elit-elit politik terutama elit partai politik. Dengan demikian bab ini berisi analisis tentang faktor peran elit politik dalam mempertajam polarisasi dan konflik gerakan mahasiswa dalam menentang dan mendukung B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid.

#### 5.1. Strategi Gerakan Mahasiswa

Mengacu pada tipologi gerakan mahasiswa yang dirumuskan Timur Mardika, gerakan mahasiswa yang dilakukan HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI bukanlah suatu jenis gerakan yang didasarkan pada suatu reaksi spontan yang sebab-sebabnya tidak begitu jelas dan menggunakan jaringan yang tidak begitu tertata.<sup>1</sup> Sebaliknya, gerakan mahasiswa yang dilakukan oleh HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI justru didasarkan pada lima hal, yaitu: (1) langkah-langkah yang terorganisir; (2) tujuan yang jelas; (3) strategi dan cara-cara yang jelas; (4) dilakukan secara sadar; (5) berdasarkan analisis yang kuat. Tentang dilakukannya kelima unsur itu, Aktivis BEMSI, Andre Rosiade, mengatakan:

“Pada awalnya kita mendukung pemerintahan Gus Dur. Seluruh elemen bangsa, seluruh rakyat Indonesia sangat mendukung pemerintahan Gus Dur tapi sesuai dengan perjalanan waktu kita melihat bahwa Presiden pada waktu itu (Alm.) Abdurrahman Wahid gagal untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Banyak sekali kebijakan-kebijakannya yang aneh, yang bikin stabilitas politik carut-marut. Lalu kebijakan-kebijakan pro-rakyatnya sangat lemah. Waktu itu konflik antar masyarakat, kasus Ambon, Poso, Maluku itu menunjukkan kegagalan pemerintah memberikan rasa aman kepada masyarakat. Salah satunya itu, masalah kasus korupsi *Buloggate*, *Bruneigate*. Sehingga kita sepakat teman-teman mahasiswa kalau gak salah

---

<sup>1</sup> Mengacu pada tipologi gerakan yang dibuat Timur Mahardika, gerakan mahasiswa termasuk ke dalam gerakan sebab memiliki langkah-langkah terorganisir dengan tujuan yang jelas, strategi dan cara-cara yang dirumuskan secara jelas pula, dilakukannya secara sadar dan didasarkan kepada suatu analisis yang kuat. Lihat Timur Mahardika, *Op. Cit.*, hal. 15-16.

itu mulai November tahun 2000 sejak mulai ada Kelompok Kaukus 11 November.<sup>2</sup> Lalu teman-teman khususnya di BEMSI, banyak yang menguasai struktur kepengurusan kemahasiswaan di universitas-universitas. Jadi kita sepakat waktu itu berdiskusi panjang lebar, kita mencoba bersama-sama untuk melakukan pergerakan untuk mengganti rezim yang ada pada waktu itu. Jadi kita mulailah gerakan itu, mulai November konsolidasi. Yang jelas dari aksi-aksi yang dilakukan BEMSI pada saat itu terus terang kita kan dipersepsikan dekat sama Akbar Tanjung, dipersepsikan dekat sama Amien Rais. Itu tidak benar! Tapi koordinasi untuk narasumber kalau kita bikin seminar memang ya, ada diskusi-diskusi dengan Kelompok Kaukus 11 November waktu itu. Kita membuat pertemuan berkala, setiap minggu kita bertemu berkala, keliling di IPB Bogor, di UI, di IKIP. Ada polarisasi juga diantara gerakan yang anti Gus Dur, ada BEMSI, ada ALFONSO. Tapi untuk BEMSI kita disatukan oleh satu visi, dimana sebagian besar aktivis BEMSI itu kader-kader KAMMI sementara aktivis ALFONSO sebagian besar kader-kader HMI.<sup>3</sup>

HMI dan KAMMI yang keduanya adalah organisasi ekstra universiter melakukan gerakan berupa aksi-aksi demonstrasi dengan langkah-langkah terorganisir dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk mempertahankan B.J. Habibie dan yang pada periode selanjutnya menjadi penentang Abdurrahman Wahid. Sedangkan FORKOT dan FKSMJ yang juga organisasi ekstra universiter melakukan gerakan berupa aksi-aksi demonstrasi dengan langkah-langkah terorganisir dengan tujuan yang jelas pula, yaitu untuk menjatuhkan atau menurunkan B.J. Habibie (Lihat Tabel 5.1).

<sup>2</sup> Munculnya Kaukus 11 November berawal dari adanya Forum Curah Pendapat pada tahun 2000, yang dimotori oleh Kwik Kian Gie. Forum ini menjadi kumpulan anggota MPR/DPR yang bergerak di luar parlemen. Karena, pertemuan di Hotel DharmaWangsa pada tanggal 11 November 2000 membuat kaukus ini dinamai seperti itu. Dalam berbagai pertemuannya, kaukus ini terus mengevaluasi pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, yang mereka nilai tidak efektif. Saat itu, Abdurrahman Wahid tersandung banyak skandal. Dua yang terbesar adalah skandal penyelewengan dana nonbujeter Bulog, dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam. Akhirnya, pada 13 Maret 2001, di ruang kaca Gedung MPR/DPR, Kaukus 11 November merekomendasikan agar MPR segera menggelar Sidang Istimewa, untuk mengganti kepemimpinan Nasional. Mereka menuntut Sidang Istimewa digelar secepatnya. Hampir semua tokoh Kaukus 11 November hadir dalam pembacaan rekomendasi itu. Selain Kwik, tampak pula Alimarwan Hanan, Subagio Anam, Ade Komarudin, Alvin Lie, Julius Usman, Ali Hardi Kiaidemak, Syamsul Muarif, Husni Thamrin, Hatta Radjasa, Fahmi Idris, Fuad Bawazier, Samuel Koto, Rully Chaerul Azwar, Hafiz Zawawi, MS Kaban, dan Dharmansyah. Di luar kaukus ini, demonstrasi mahasiswa meminta Wahid diganti pun terus berlangsung. Akhirnya, MPR menggelar Sidang Istimewa. Abdurrahman Wahid pun jatuh, dan digantikan Megawati. Lihat *Kaukus 11 November Evaluasi Pemerintahan Mega*, dalam Koran *Tempo*, Jumat, 24 Mei 2002

<sup>3</sup> Wawancara dengan Andre Rosiade, Aktivis BEMSI, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, , pada tanggal 25 Maret 2010 di Jakarta.

**Tabel 5.1:**  
**Organisasi Gerakan Mahasiswa**  
**Pendukung dan Penentang B.J. Habibie**

Organisasi Mahasiswa Pendukung B.J. Habibie	Organisasi Mahasiswa Penentang B.J. Habibie
1. KAMMI 2. HMI DIPO 3. JMI 4. HAMMAS 5. HMI 6. PII 7. IMM	1. AKRAB 2. FORKOT 3. FAMRED 4. FKSMJ 5. FKJ 6. KB-UI 7. KM-ITB 8. KM-Univ.Siliwangi 9. GEMPUR 10. HMI MPO 11. KOBAR 12. FORBES 13. KPRP 14. KMPRL 15. DRMS 16. KOMRAD 17. GMNU 18. GKPB 19. GMNI 20. AMARA 21. KMB 22. FORMA 23. FRONT JAKARTA

**Sumber:** Diolah oleh penulis dari wawancara dengan aktivis HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI. Lihat juga Munafrizal Manan, *Gerakan Rakyat Melawan Elit*, Yogyakarta: Resist Book, 2005. Suharsih dan Ign Mahendra K, *Bergerak Bersama Rakyat: Sejarah Gerakan Mahasiswa dan Perubahan Sosial di Indonesia*, Yogyakarta: Resist Book, 2007, hal. 110-125.

HMI dan KAMMI yang mendukung B.J. Habibie keduanya secara sadar berdasarkan analisis dan argumennya berusaha mempertahankan kekuasaan B.J. Habibie dan siap berhadapan dengan para penentang B.J. Habibie yang juga memiliki alasan-alasan yang kuat. Berbagai alasan HMI dan KAMMI dalam mendukung B.J. Habibie, —seperti B.J. Habibie seorang tokoh Islam, masa jabatan B.J. Habibie yang baru berakhir pada tahun 2002 dan kesediaan B.J. Habibie melaksanakan sejumlah agenda reformasi; melepaskan Napol/Tapol Orde Baru— digunakannya untuk melawan FORKOT dan FKSMJ yang menentang B.J. Habibie. Ahmad Sumargono, misalnya, elit politik pendukung B.J. Habibie yang sering melakukan aksi-aksi dalam mendukung B.J. Habibie mengatakan:

**Universitas Indonesia**

“Yah, saya jelas, saya kan punya latar belakang ideologi, kalau dilihat pemerintahan B.J. Habibie pada saat itu, mempunyai poin terutama ideologi dalam arti Islam yah. Kita melihat dalam pemerintahan Habibie itu, banyak keuntungan-keuntungan yang diperoleh dalam Islam, artinya, dia membuat ICMI, museum Islam dan sebagainya. Kemudian dia tegas, dalam paradigma dia, dia punya konsep proporsional, tidak memandang mayoritas-minoritas, artinya, wajar dong kalau kita mayoritas kita harus memiliki kekuasaan yang lebih besar. Nah, itu yang saya ingat tentang konsepnya dia, sehingga kalau kita berbicara waktu itu, sebetulnya dia berpihak kepada Islam, betul sekalipun dia awam dalam keislaman, nah, itu yang kita dukung kan, kita melihat dari segi keberkahan. Dalam masalah ini, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai enam sekian persen, iya kan? Dollar bisa turun, nah itu yang kita dukung. Jadi saya melihat dari segi keberpihakan secara ideologis, maka ini kita anggap sudah tepat, dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran sebelumnya, dia yang paling tepat.”<sup>4</sup>

Sebaliknya, FORKOT dan FKSMJ penentang B.J. Habibie berargumen bahwa B.J. Habibie yang masih merupakan bagian dari rezim Orde Baru tidak dapat dan tidak sungguh-sungguh melaksanakan reformasi total, seperti yang ditunjukkan oleh sikapnya yang menolak pengadilan Soeharto. Dengan alasan itu FORKOT dan FKSMJ siap berhadapan dengan HMI dan KAMMI yang mendukung B.J. Habibie. Sri Bintang Pamungkas, misalnya, elit politik penentang B.J. Habibie yang sering bekerjasama dengan FORKOT tetap mengakui keberhasilan B.J. Habibie disamping kegagalannya yang menjadi sebab-sebab kejatuhannya. Sri Bintang Pamungkas mengatakan:

“Tapi itulah B.J. Habibie! Dia diangkat oleh Soeharto menjadi Wakil Presiden RI pada Maret 1998. Ketika Soeharto harus mundur dua bulan kemudian karena dipaksa oleh para pemuda dan mahasiswa, Soeharto pulalah yang memberinya kedudukan Presiden RI. Sampai di sini dia berhasil secara politik dengan menduduki jabatan tertinggi negara. Tetapi karakter *semau-gue*-nya tidak menyebabkannya tunduk, sekalipun kepada Soeharto, orang tua yang telah mendidiknya dan membukakan jalan mudah baginya. Selama itu, dia melakukan pembaharuan-pembaharuan dengan cepat menurut cara dan pandangannya sendiri; lebih dari 60 undang-undang dibuatnya dalam sepuluh bulan saja tahun 1999, termasuk dicabutnya Undang-Undang Anti-Subversi, Dia juga mengecam Soeharto sebagai otoriter dan tidak demokratis. Tetapi Habibie juga tidak punya ‘ketahanan politik’ yang panjang. Dia mudah menyerah oleh tekanan-tekanan; mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang dianggapnya dekat dan menyanjungnya; dan suka tidak berpikir panjang tentang akibat-akibat keputusannya. Dia

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ahmad Sumargono, Elit politik PBB dan aktivis KISDI Pendukung Pemerintahan B.J. Habibie, Kamis, 01 April 2010, di Jakarta

memaksa pemilihan umum dipercepat sebelum kedudukannya menjadi kuat. Dia juga melepaskan Timor-Timur begitu saja. Bahkan, mundur begitu saja dalam pencalonan Presiden RI pasca Pemilihan Umum 1999 sebelum pertarungan dimulai.”<sup>5</sup>

**Tabel 5.2:**  
**Organisasi Mahasiswa**  
**Pendukung dan Penentang Abdurrahman Wahid**

Organisasi Mahasiswa Pendukung Abdurrahman Wahid	Organisasi Mahasiswa Penentang Abdurrahman Wahid
1. BEMI	1. BEMSI
2. FORKOT	2. KAMMI
3. LMND	3. HMI
4. FAMRED	4. JMI
5. PMII	5. AMKPK
6. GMNU	6. KAMMU

**Sumber:** Diolah oleh penulis dari wawancara dengan aktivis BEMI dan BEMSI. Lihat juga Suharsih dan Ign Mahendra K, *Bergerak Bersama Rakyat: Sejarah Gerakan Mahasiswa dan Perubahan Sosial di Indonesia*, Yogyakarta: Resist Book, 2007, hal. 126-132.

Begitu pula persetujuan antara BEMI yang mendukung Abdurrahman Wahid dan BEMSI yang menentang Abdurrahman Wahid (Lihat Tabel 5.2). Dalam upaya mendukung dan mempertahankan Abdurrahman Wahid, BEMI beralasan bahwa selain seorang demokrat sejati dan tokoh pluralis, Abdurrahman Wahid juga telah melaksanakan sejumlah agenda reformasi diantaranya adalah mencabut TAP MPR tentang Tapol/Napol Komunis, membuka ruang bagi etnis Tionghoa untuk mengembangkan budaya dan merayakan hari-hari keagamaannya, mengangkat Panglima TNI dari unsur TNI AL dan lain-lain. Quddus Salam, Aktivis BEMI tentang dukungan kepada Abdurrahman Wahid mengatakan:

“Kami jelas, bahwasanya ini persoalan ide-ide kerakyatan, ide-ide pluralisme, itu sangat penting, termasuk bagaimana perombakan soal hukum, soal struktur pemerintahan, dan itu hanya dilakukan oleh Gus Dur. Kenapa kita membela itu, Satu misalnya, pemisahan Polri dengan TNI, bagi kita, itu sangat besar. Yang kedua, soal regulasi, soal kepemimpinan, terutama di ABRI misalnya, yang dulu didominasi oleh TNI AD, itu tiba-tiba digeser menjadi AL, ini cukup besar bagi kita, ini tidak ada dalam sejarah pemerintahan Soeharto, itu masih didominasi TNI AD, nah ini kita

<sup>5</sup> Sri Bintang Pamungkas, *Menantang Seorang Diktator Perjalanan Di Jerman*, Jakarta: RMBOOK, 2008, hal. 294.

lihat, ada angin segar ditubuh organisasi yang sangat mapan di Indonesia, yaitu Tentara.”<sup>6</sup>

Sebaliknya, BEMSI yang tidak setuju dengan alasan dan sikap BEMI tetap menolak Abdurrahman Wahid dengan sejumlah argumen antara lain, yaitu: Abdurrahman Wahid terlibat dalam skandal Dana Yana Tera Bulog (*Buloggate*) dan dana sumbangan Sultan Brunei Darussalam (*Bruneigate*).<sup>7</sup> Tentang sosok Abdurrahman Wahid yang pada awalnya mendapat sambutan dan karena kebijakan-kebijakannya kemudian ditolak oleh mahasiswa, Andre Rosiade aktivis BEMSI, mengatakan:

”Pada awalnya kita mendukung pemerintahan Gus Dur. Seluruh elemen bangsa, seluruh rakyat Indonesia sangat mendukung pemerintahan Gus Dur pada awalnya, tapi sesuai dengan perjalanan waktu kita melihat bahwa Presiden (Alm.) Abdurrahman Wahid gagal untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Banyak sekali kebijakan kebijakannya yang aneh, yang bikin stabilitas politik carut-marut, lalu kebijakan-kebijakan pro-rakyatnya sangat lemah. Waktu itu konflik antar masyarakat, kasus Ambon, Poso, Maluku itu menunjukkan kegagalan pemerintah memberikan rasa aman kepada masyarakat. Salah satunya itu, masalah kasus korupsi *buloggate*, *bruneigate* itu. .... Jadi kita sepakat waktu itu berdiskusi panjang lebar sepakat kita mencoba bersama-sama untuk melakukan pergerakan untuk mengganti rezim yang ada pada waktu itu.”<sup>8</sup>

Berkaitan dengan tujuan dan strategi gerakan mahasiswa, ada dua jenis strategi perjuangan HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI dalam melakukan gerakan, yaitu: (1) strategi gerakan moral; (2) strategi gerakan politik.<sup>9</sup> Kedua strategi itu digunakan dalam mendukung dan menentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. Namun strategi gerakan politik tetap yang lebih menonjol dibandingkan dengan gerakan moral, sehingga memungkinkan kerjasama dengan para elit politik pendukung dan penentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Quddus Salam Aktivis BEMI, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel, Surabaya pendukung Abdurrahman Wahid, Jumat tanggal 25 Maret 2010 di Jakarta.

<sup>7</sup> Tentang skandal Dana Yayasan Yanatera Bulog (*Bulogate*) dan dana sumbangan Sultan Brunei Darussalam (*Bruneigate*) lihat Siti Nur Chalifah, Tesis S2, Jakarta: PPs Ilmu Politik, 2004.

<sup>8</sup> Wawancara penulis dengan Aktivis BEMSI, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Andre Rosiade, pada tanggal 25 Maret 2010 di Jakarta.

<sup>9</sup> Gerakan moral menurut Muridan S. Widjojo mendasarkan diri pada pandangan bahwa perubahan politik dapat dilakukan dengan cara "menghimbau" atau "mengingatkan" kepada elit politik. Lihat Muridan S. Widjojo Muridan S. Widjojo, *Penakluk Rezim Orde Baru: Gerakan Mahasiswa 98*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999, hal. 240. Tentang gerakan moral yang dilakukan oleh Angkatan 80 lihat Denny, JA, *Gerakan Mahasiswa dan Politik Kaum Muda era 80-an*, Jakarta: CV. Miswar, 1990. Tentang gerakan moral dan politik lihat Arbi Sanit, *Pergolakan Melawan Kekuasaan: Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral dan Politik*, Yogyakarta: Insist Press, 1999.

Tentang adanya kerjasama kedua belah pihak atas dasar moral dan politik, Arif Rahman, Aktivis dan Koordinator BEMI pendukung Abdurrahman Wahid mengatakan:

”Kalau dari partai PKB tidak ada, pro Gus Dur ada beberapa kelompok yang memang itu sama ide dan pemikirannya tentang demokrasi dan memang pilihannya terhadap Gus Dur. Nah itu bantuannya logistik. Jadi kalau misalkan dulu kita kan memang banyak ada kelompok-kelompok jaringan yang memberikan misalkan dulu ada Suara Ibu Peduli itu hanya sifatnya logistik, tidak berupa uang kalau uang itu kan misalkan kita seperti melakukan pertemuan di Yogyakarta selain kolektif dari kampus-kampus kaya, saya misalnya dari kampus Universitas Tarumanagara saya bisa kondisikan dari Yayasan dan akhirnya kita di *backup* untuk berangkat dan membantu acara tersebut. Kita juga meminta kebeberapa orang yang kita anggap satu pemikiran satu ide dengan kita dan akhirnya mereka membantu kita dan sifatnya hanya kalau memang kita ada kegiatan, kita minta bantuan mereka. Selain itu juga kita bantu teman-teman yang di luar Jawa seperti di kampus Yogya, Surabaya, Jawa Timur itu mereka datang untuk berdemonstrasi mendukung Gus Dur.”<sup>10</sup>

Adanya kerjasama kedua belah pihak atas dasar moral dan politik, Andre Rosiade, Aktivis BEMSI penentang Abdurrahman Wahid, secara tegas mengatakan:

”Waktu saya bikin seminar pada bulan Januari 2001, pada hari pelantikan saya sebagai Presiden Mahasiswa. Saya bikin seminar soal kasus *Buloggate* yang dihadiri oleh Jusuf Kalla, Bambang Soedibyo, lalu Kwik Kian Gie. Soal bantuan, memang ditawarkan, tapi saya bilang, tidak usah, saya hanya butuh narasumber hadir, karena untuk pembiayaan acara saya sudah cukup. Saya tolak waktu itu. Tapi memang mereka menawarkan apa yang bisa dibantu, saya bilang tidak, karena saya ingin jelas, kita ingin jelas bahwa gerakan kita gerakan moral bukan gerakan yang ditunggangi oleh partai politik.”<sup>11</sup>

Pengertian gerakan moral bagi aktivis mahasiswa seperti penegasan Arif Rahman dari BEMI dan Andre Rosiade dari BEMSI sangat sederhana, yaitu sepanjang gerakannya tidak ditunggangi oleh partai politik. Namun penegasan Arif Rahman dan Andre Rosiade tentang tiga hal pokok, yaitu: (1) adanya elit politik yang menawarkan bantuan dana untuk membiayai gerakan BEMI dan BEMSI; (2) upaya BEMI dan BEMSI tidak ingin gerakannya

<sup>10</sup> Wawancara dengan Arif Rahman, Aktivis BEMI, Mahasiswa Universitas Tarumanagara, Sabtu tanggal 28 November dan Jumat tanggal 02 April 2010 di Jakarta.

<sup>11</sup> Wawancara penulis dengan Andre Rosiade, Aktivis BEMSI, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, pada tanggal 25 Maret 2010 di Jakarta.

ditunggangi; (3) gerakannya merupakan gerakan moral, bagaimana pun tetap membenarkan pendapat Muridan S. Widjojo tentang gerakan BEMI dan BEMSI yang mengandung aspek moral dan politik.

Akan tetapi meskipun diakuinya sebagai gerakan moral, gerakan mahasiswa yang dilakukan oleh HMI, KAMMI, FORKOT dan FKSMJ pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan gerakan mahasiswa yang dilakukan oleh BEMI dan BEMSI pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid tetap termasuk ke dalam jenis gerakan politik.<sup>12</sup> Disebut gerakan politik, karena semua gerakan yang dilakukan oleh HMI, KAMMI, FORKOT dan FKSMJ pada masa pemerintahan B.J. Habibie, dan gerakan yang dilakukan oleh BEMI dan BEMSI pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid tidak lagi semata-mata terbatas pada upaya menyuarkan kebenaran universal, menolak segala bentuk pelanggaran HAM, penindasan, kesewenang-wenangan, kedzaliman dan otoriterianisme.

Lebih jauh dari itu, gerakan HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI sudah bersifat politis atau berkaitan dengan kekuasaan, karena aksinya sudah bertujuan mempertahankan dan atau menjatuhkan kekuasaan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. Tentang gerakan mahasiswa yang mendukung Abdurrahman Wahid yang awalnya dilakukan melalui strategi gerakan moral lalu berubah menjadi strategi gerakan politik, Arif Rahman, Aktivistis dan Koordinator BEMI mengatakan:

”Ya jelas kalau bicara kepentingan karena korelasi kita ke NU jelas kita punya kepentingan politik tapi kepentingan politik itu ada dasarnya bahwa dasarnya Gus Dur ingin membangun demokrasi di Indonesia dengan mencabut Dwi Fungsi ABRI dan lain-lain. Gus Dur berani membubarkan

---

<sup>12</sup> Menurut Ali Ansori gerakan politik adalah gerakan yang berkaitan dengan kekuasaan, sedangkan gerakan moral (*moral movement*) adalah upaya melakukan perubahan dengan cara menyuarkan kebenaran universal, menolak segala bentuk pelanggaran HAM, penindasan, kesewenang-wenangan, kedzaliman dan otoriterianisme. Lihat Ali Ansori, “*Refleksi Gerakan Mahasiswa*”, dalam <http://anshori.wordpress.com/2007/10/04/refleksi-gerakan-moral-mahasiswa>. Di akses 11 Juni 2009. Gerakan politik pada masa Orde Lama dilakukan oleh Angkatan 66 (Tritura) Lihat Yozar Anwar, *Angkatan 66: Sebuah Catatan Harian Mahasiswa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1981, Moechtar, Hasyrul, *Mereka dari Bandung: Pergerakan Mahasiswa Bandung 1960-1967*, Bandung: Penerbit Alumni, 1998. Sedangkan gerakan politik pada masa Orde Baru dilakukan Angkatan 77/78 (Peristiwa Malari) dan Angkatan 98 (Peristiwa Mei 98). Lihat Diro Aritonang, *Runtuhnya Rezim “daripada” Soeharto*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999. Mochtar, Pabottingi, *Aksi Mahasiswa Menuju Gerbang Reformasi*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998.

Golkar itu yang melandasi bahwa Gus Dur tokoh yang kita harus *support* dan jaga.”<sup>13</sup>

Begitu juga dengan berubahnya gerakan mahasiswa BEMSI yang menentang Abdurrahman Wahid yang awalnya dilakukan melalui strategi gerakan moral lalu berubah menjadi strategi gerakan politik, Taufik Riyadi, Aktivist BEMSI mengatakan:

“Jadi begini yah, awal mulanya, sebenarnya *frame* gerakan, semuanya adalah gerakan-gerakan moral, semuanya kan seruan moral. Kita ingin agar agenda-agenda reformasi itu berjalan, secara umum, seperti itu sebenarnya kita menjadi anti-Gus Dur. Dengan perjalanannya kemudian yang terjadi adalah pergantian Habibie terus akhirnya terpilihlah secara demokratis, Abdurrahman Wahid dan Megawati. Dalam perjalanannya terjadi lagi penyimpangan agenda-agenda reformasi. Terutama masalah KKN yang menjadi sorotan publik, saat itu *Buloggate* dan *Brunaigate*. Itu akhirnya mendorong teman-teman gerakan untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan seperti itu, dan pada saat itu belum ada agenda sampai penjatuhan Gus Dur. Agenda kita hanya minta diluruskan kembali agenda reformasi yang sudah disepakati waktu itu oleh seluruh elemen-elemen gerakan mahasiswa. Pada perjalanannya kemudian ketika kita kembali menyerukan kembalilah. Artinya stoplah proses, karena ini merugikan kepentingan bangsa dan negara pada saat itu. Tapi ternyata mendapat respon malah sebaliknya. Ini juga, pemerintah sangat bersikeras bukan suatu penyimpangan. Akhirnya pada saat itu saya dan teman-teman sepakat pada saat itu memulai pergerakan itu kembali. Di awal itu dengan skor moral itu, kita minta Presiden Abdurrahman Wahid untuk tidak melakukan KKN itu. Itu yang utamanya. Pada proses itu menjadi *snow ball*, yang menggelinding sedemikian cepat, dan akhirnya pada titik ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi ini pemerintahan, dan akhirnya teman-teman sepakat meminta Presiden Abdurrahman Wahid untuk mengundurkan diri.”<sup>14</sup>

Selain dilakukan oleh HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI, gerakan politik juga dilakukan oleh para elit politik; (1) pendukung B.J. Habibie, seperti Akbar Tanjung, Wiranto, Djaja Suparman, Noegroho Djajoesman, Kivlan Zen, Setiawan Djody, Jimmly Asshiddiqie, Fadel Muhammad, Yusril Ihza Mahendra, Ahmad Sumargono, Ali Yafie, Zainuddin MZ, Emha Ainun Nadjib, Eggi Sudjana, Hariman Siregar, MS. Ka’ban, Marwah Daud, Dewi Fortuna Anwar dan lain-lain (Lihat Tabel 5.3);

<sup>13</sup> Wawancara dengan Arif Rahman, Aktivist BEMI, Mahasiswa Universitas Tarumanagara, Sabtu tanggal 28 November dan Jumat tanggal 02 April 2010 di Jakarta.

<sup>14</sup> Wawancara penulis dengan Taufik Riyadi, Aktivist BEMSI, Ketua BEM UI, penentang Abdurrahman Wahid, di Jakarta pada tanggal 01 April 2010.

(2) penentang B.J. Habibie, seperti, Amien Rais, Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid, Sri Sultan Hamengku Buwono, Sri Bintang Pamungkas, Haryanto Taslam, Ali Sadikin, Kemal Idris, Sarwono Kusumaatmaja, Siswono Yudohusodo, Usep Ranawijaya, Sri Edi Swasono, Eros Jarot, Sukmawati Soekarnoputri, Roch Basuki, Permadi, Hariadi Darmawan, Arifin Panigoro, Rahmat Witoelar, Ratna Sarumpaet, Romo Sandyawan dan lain-lain (Lihat Tabel 5.3); (3) pendukung Abdurrahman Wahid, seperti Muhaimin Iskandar, Alwi Shihab, Khofifah Indar Parawansa, Ali Masykur Musa, Mahfud MD, Effendi Choirie, Sholahuddin Wahid, Hasyim Wahid, Marsillam Simanjuntak, Erna Witoelar, Bondan Gunawan, Rahmat Witoelar dan lain-lain (Lihat Tabel 5.4); (4) penentang Abdurrahman Wahid, seperti Akbar Tanjung, Amein Rais, Megawati Soekarnoputri, Matori Abdul Djalil, Hidayat Nurwahid, Jusuf Kalla, Hamzah Haz, Laksamana Sukardi, Wiranto, Ryaas Rasyid, Arifin Panigoro, Bachtiar Chamsyah, Surya Darma Ali, Fuad Bawazier, Yuzril Ihza Mahendra, Alvin Lie, Ade Komaruddin, Hari Sabarno, Arifin Panigoro dan lain-lain (Lihat Tabel 5.4).<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Bila mengacu pada konsep elit politik yang digunakan Gaetano Mosca, maka kelas politik mencakup: (1) anggota-anggota pemerintahan dan pejabat tinggi, seperti B.J. Habibie, Abdurrahman, Laksamana Sukardi (menteri yang diberhentikan), Muhammad Jusuf Kalla (menteri yang diberhentikan), Hamzah Haz (menteri yang diberhentikan); (2) pemimpin militer seperti Wiranto (menteri yang diberhentikan) dan Soesilo Bambang Yudhoyono (menteri yang diberhentikan); (3) Aristokrat yang berpengaruh, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono; (4) pemimpin partai yang berada di luar lembaga pemerintahan (eksekutif), seperti Amien Rais (PAN), Akbar Tanjung (Golkar), Bachtiar Chamsyah (PPP), Sri Bintang Pamungkas (PUDI), (5) wakil-wakil kelompok kepentingan sosial baru, seperti Ahmad Sumargono (KISDI), Rahman Tolleng (Fordem); (6) kelompok-kelompok pengusaha, seperti Arifin Panigoro (PDI-P), Adi Sasono (PDR/CIDES); (7) intelektual yang aktif dalam politik, seperti Din Syamsuddin (Muhammadiyah) dan lain-lain. Tentang kelas politik merupakan elit politik lihat Mosca dalam T.B. Bottomore, *Op.Cit*, hal. 4-20

**Tabel 5.3:**  
**Elit Politik Pendukung dan Penentang B.J. Habibie<sup>16</sup>**

Penentang	Pendukung
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ali Sadikin (Barnas)</li> <li>2. Hoegeng Iman Santoso (Barnas)</li> <li>3. Jenderal (Purn.) Edi Sudradjat (Barnas)</li> <li>4. Solichin G.P. (Barnas)</li> <li>5. Hariadi Darmawan (ILUNI UI)</li> <li>6. Subroto (Barnas)</li> <li>7. Rachmat Witoelar (Barnas)</li> <li>8. Usep Ranawijaya (Barnas)</li> <li>9. Sri Edi Swasono (Barnas)</li> <li>10. Sukmawati Sukarnoputri (Barnas)</li> <li>11. Roch Basuki (Barnas)</li> <li>12. Arifin Panigoro (PDIP)</li> <li>13. Theo Syafei (PDIP)</li> <li>14. Dimiyati Hartono (PDIP)</li> <li>15. Amien Rais (PAN)</li> <li>16. Abdurrahman Wahid (PKB)</li> <li>17. Megawati Soekarnoputri (PDIP)</li> <li>18. Sri Sultan Hamengkubowono X (Gubernur Yogyakarta)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ahmad Sumargono (KISDI)</li> <li>2. Eggi Sudjana (PPMI)</li> <li>3. Letjend (Purn) Fachrur Rozi</li> <li>4. Fadly Zon (IPS)</li> <li>5. Rama Pratama (UI)</li> <li>6. Fadel Muhammad (Politisi Golkar)</li> <li>7. Hariman Siregar (Aktivis Malari)</li> <li>8. A.A. Baramulli (IRAMASUKA)</li> <li>9. Akbar Tanjung (Golkar)</li> <li>10. Adi Sasono (ICMI)</li> <li>11. Dewi Fortuna Anwar (ICMI)</li> <li>12. Kivlan Zein (Purnawirawan TNI)</li> <li>13. Marwah Daud Ibrahim (IRAMASUKA)</li> <li>14. Fachri Hamzah (KAMMI)</li> <li>15. Anas Urbaningrum (HMI)</li> <li>16. M. S. Kaban</li> </ol>

**Sumber:** Diolah oleh penulis dari wawancara dengan narasumber (lihat Daftar Pustaka), seperti wawancara dengan Akbar Tanjung di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2009 dan tanggal 24 Mei 2010, wawancara dengan Ahmad Sumargono, Aktivis Islam pendukung B.J. Habibie di Jakarta pada tanggal 01 April 2010, wawancara dengan Sarbini, mahasiswa Univeristas Tujuh Belas Agustus (UNTAG) Jakarta dan Aktivis FKSMJ, tanggal 27 Maret 2010 di Jakarta, wawancara dengan Andre Rosiade Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti dan Aktivis BEMSI di Jakarta tanggal 25 Maret 2010, wawancara dengan Arif Rahman Aktivis BEMI di Jakarta tanggal 2010, wawancara dengan Muhaimin Iskandar elit politik PKB di Jakarta 2010 dan wawancara dengan Hasyim Wahid elit politik PDIP di Jakarta 2010.

<sup>16</sup> Penetapan elit politik dalam kelompok pendukung dan penentang B.J. Habibie didasarkan pada: (1) pengakuan narasumber tentang keterlibatannya dalam mendukung gerakan mahasiswa yang menentang dan mendukung B.J. Habibie; (2) publikasi sikap politiknya yang menentang dan mendukung B.J. Habibie di media massa.

**Tabel 5.4:**  
**Elit Politik Pendukung dan Penentang Abdurrahman Wahid<sup>17</sup>**

Penentang	Pendukung
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amien Rais (PAN)</li> <li>2. Fuad Bawazier (PAN)</li> <li>3. Ade Komarudin (Golkar)</li> <li>4. Alvien Lie (PAN)</li> <li>5. Bachtiar Chamsjah (PPP)</li> <li>6. Akbar Tanjung (Golkar)</li> <li>7. Hidayat Nur Wahid (PKS)</li> <li>8. Arifin Panigoro (PDIP)</li> <li>9. Ali Marwan Hanan (PPP)</li> <li>10. Kwiek Kian Gie (PDIP)</li> <li>11. Ali Hardi Kiaidemak (PPP)</li> <li>12. Syamsul Muarif (Golkar)</li> <li>13. Husni Thamrin (PPP)</li> <li>14. Hatta Radjasa, (PAN)</li> <li>15. Fahmi Idris (Golkar)</li> <li>16. MS Kaban (PBB)</li> <li>17. Subagio Anam (PDIP)</li> <li>18. Dharmansyah (PBB)</li> <li>19. Fakhruddin (HMI)</li> <li>20. Mathori Abdul Jalil (PKB)</li> <li>21. Jusuf Kalla (Golkar)</li> <li>22. Wiranto (TNI)</li> <li>23. Hamzah Haz (PPP)</li> <li>24. Laksamana Sukardi (PDIP)</li> <li>25. Andi Mallarangeng (Pengamat Politik)</li> <li>26. Dewi Fortuna Anwar (ICMI)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muhaimin Iskandar (PKB)</li> <li>2. Ali Masykur Musa (PKB)</li> <li>3. Khofifah Indar Parawansa (PKB)</li> <li>4. Effendi Choiriy (PKB)</li> <li>5. Dr. Thamrin Amal Tamagola (Akademisi)</li> <li>6. Erna Witoelar (LSM)</li> <li>7. Nursyahbani Katjasungkana (LSM)</li> <li>8. Wimar Witoelar (Cendekiawan)</li> <li>9. Marsillam Simanjutak (Fordem)</li> <li>10. Adhie M Massardi (Budayawan)</li> <li>11. Hasyim Muzadi (PBNU)</li> <li>12. KH. Said Aqiel Siradj (PBNU)</li> <li>13. Muhyidin Arubusman (PKB)</li> <li>14. Prof. Dr. Harun Al Rasyid, SH (Akademisi)</li> <li>15. Mahfud MD (Menhan)</li> <li>16. Hasyim Wahid (PDIP)</li> <li>17. Emha Ainun Najib (Budayawan)</li> <li>18. Emmy Hafid (LSM)</li> <li>19. Lutfie Iskandar (FORKOT)</li> <li>20. Nusron Wahid (PMII)</li> </ol>

**Sumber:** Diolah dari wawancara dengan narasumber (lihat lampiran), wawancara dengan Andre Rosiade Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti dan Aktivist BEMSI di Jakarta tanggal 25 Maret 2010, wawancara dengan Arif Rahman aktivis BEMI di Jakarta tanggal 2010, wawancara dengan Muhaimin Iskandar elit politik PKB di Jakarta 2010, wawancara dengan Hasyim Wahid elit politik PDIP di Jakarta 2010.

Baik para elit politik yang mendukung B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid maupun para elit politik yang menentang atau yang beroposisi kepada B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid kedua-duanya berusaha melakukan gerakan politik melalui partai politik, melalui DPR/MPR atau melalui organisasinya masing-masing, seperti Ahmad Sumargono yang membela B.J. Habibie melalui KISDI atau Wiranto dan Kivlan Zen yang membentuk

<sup>17</sup> Penetapan elit politik dalam kelompok pendukung/penentang Abdurrahman Wahid didasarkan pada: (1) pengakuan narasumber tentang keterlibatannya dalam mendukung gerakan mahasiswa yang menentang/ mendukung B.J. Habibie; (2) publikasi sikap politiknya yang menentang/ mendukung B.J. Habibie di media massa.

Pam Swakarsa.<sup>18</sup> Mereka juga bersaing mencari dukungan dari gerakan mahasiswa agar dengan mudah melakukan tekanan-tekanan dari bawah melalui aksi-aksi massa.<sup>19</sup>

Namun berbeda dengan gerakan politik yang dilakukan oleh HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI yang langsung melakukan aksi-aksi massa berupa demonstrasi mendukung dan menentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid, gerakan politik yang dilakukan oleh para elit politik pendukung dan penentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid lebih banyak melalui pernyataan-pernyataan politik dibanding aksi-aksi demonstrasi, seperti Deklarasi Ciganjur yang berisi pesan agar B.J. Habibie segera mengakhiri jabatannya dengan cara mempercepat pemilu.<sup>20</sup> Para oposisi Abdurrahman Wahid, misalnya, seperti Amien Rais, Akbar Tanjung, Bachtiar Chamsjah, Yusril Ihza Mahendra dan Arifin Panigoro melakukan dialog akademik, pidato-pidato politik, gerakan budaya dan statement-statement politik untuk menolak kebijakan Abdurrahman Wahid yang dianggapnya tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, seperti kebijakan membebaskan Tapol/Napol eks-komunis, keterlibatan dalam kasus *Bullogate* dan *Bruneigate*.<sup>21</sup>

Gerakan politik para elit politik juga dilakukan dengan cara mendukung dan bergabung dengan aksi-aksi massa mahasiswa yang dilakukan oleh HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI. Misalnya, kehadiran Amien Rais di tengah-tengah aksi demonstrasi BEMSI di Istana Merdeka pada bulan Juni 2001 yang menuntut Presiden Abdurrahman Wahid mundur dari jabatannya.

<sup>18</sup> Tentang Ahmad Sumargono menggunakan KISDI lihat *Tempo* Edisi 06/XXVII, 10 November 1998. Tentang Wiranto dan Kivlan Zen yang menggunakan Pam Swakarsa lihat *Mantan Pamswakarsa Minta Pertanggungjawaban Wiranto*, dalam *Kompas* 29 Juni 2004, *Furkon Digadang Militer, Nikmat Membawa Sengsara* dalam *Tempo* 23 November 1998, *Serial Konflik Elit* dalam *Tempo* 21 Juni 2004 dan *Kivlan Zen Tantang Wiranto ke Pengadilan* dalam *Kompas*, 10 Juni 2004

<sup>19</sup> Pengakuan Andre Rosiade bahwa dia ditawari bantuan dana oleh elit politik menunjukkan adanya upaya elit politik mencari dukungan atau simpati dari kelompok-kelompok gerakan mahasiswa. Wawancara penulis dengan Andre Rosiade, Aktivist BEMSI, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, pada tanggal 25 Maret 2010 di Jakarta.

<sup>20</sup> Lihat Lampiran 7 tentang Dialog Tokoh-Tokoh Nasional Ciganjur.

<sup>21</sup> Pada Dialog Nasional di Ciganjur bertemu empat tokoh oposisi B.J. Habibie, yaitu Amien Rais, Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid dan Sri Sultan Hamengkubowono X yang diprakarsai oleh FKSMJ, KM-ITB, Universitas Siliwangi tanggal 10 Nopember 1998. Kedua belah pihak yang menentang dan mengkritik kebijakan-kebijakan B.J. Habibie yang dianggapnya tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara, seperti kebijakan referendum terbatas di Timor Timur. Lihat Lampiran 7 *Deklarasi Ciganjur*.

Kehadiran Amien Rais di tengah aksi-aksi demonstrasi BEMSI yang menentang Abdurrahman Wahid pada tanggal 11 Maret 2001. Andre Rosiade, Aktivist BEMSI, mengatakan:

“Tapi kalau partai politik mencoba mendekati itu iya, seperti waktu aksi 11 Maret 2001 kita mengepung Istana, tiba-tiba Amien Rais datang seakan-akan mengklaim dia yang memimpin sebenarnya, padahal aksi-aksi kita tidak ada dukungan Amien Rais, tapi memang waktu aksi 12 Maret itu kita melakukan sosialisasi ke masyarakat, ke partai-partai politik ke seluruh gerakan yang ada di Indonesia bahwa kita akan melakukan aksi yang besar untuk mengepung Gus Dur dari pagi sampai sore. Jadi nanti seluruh elemen-elemen masyarakat hadir bersama kita, sehingga dia bisa hadir bersama kita, maksudnya hampir semua partai politik mengirim massa.”<sup>22</sup>

Dalam melakukan gerakan politik, gerakan mahasiswa pendukung dan penentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid masing-masing didukung oleh elit politik pendukung dan penentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. Misalnya HMI yang mendukung B.J. Habibie didukung oleh Akbar Tanjung,<sup>23</sup> KAMMI yang mendukung B.J. Habibie didukung oleh Nurmahmudi Ismail,<sup>24</sup> sedangkan FKSMJ dan FORKOT yang menentang B.J. Habibie keduanya didukung oleh Arifin Panigoro.<sup>25</sup> Begitu pula dengan BEMI yang mendukung Abdurrahman Wahid didukung oleh Muhaimin Iskandar (PKB)<sup>26</sup> dan Ali Masykur Musa (PKB),<sup>27</sup> sedangkan BEMSI yang menentang Abdurrahman Wahid didukung oleh elit-elit partai politik, seperti Amien Rais (PAN), Alvien

<sup>22</sup> Wawancara penulis dengan Aktivist BEMSI, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Andre Rosiade, pada tanggal 25 Maret 2010 di Jakarta.

<sup>23</sup> Dukungan Akbar Tanjung terhadap HMI terungkap terungkap dalam wawancara penulis dengan Andre Rosiade, Aktivist BEMSI, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, 25 Maret 2010.

<sup>24</sup> Dukungan Nurmahmudi Ismail terhadap KAMMI terungkap dalam wawancara penulis dengan Fachri Hamzah, Presiden KAMMI di Jakarta tanggal 3 April 2010.

<sup>25</sup> Dukungan Arifin Panigoro terhadap FORKOT terungkap dalam wawancara penulis dengan Eli Salomo, Aktivist Forkot, di Jakarta 28 November tanggal 2010

<sup>26</sup> Dukungan Muhaimin Iskandar terhadap BEMI terungkap dalam wawancara penulis dengan Muhaimin Iskandar, Anggota DPR RI Fraksi PKB periode Abdurrahman Wahid di Jakarta tanggal 2010, Wawancara dengan Arif Rahman, Aktivist BEMI di Jakarta tanggal 22 Maret 2010

<sup>27</sup> Dukungan Ali Masykur Musa terhadap BEMI terungkap dalam wawancara penulis dengan Muhaimin Iskandar, Anggota DPR RI Fraksi PKB periode Abdurrahman Wahid di Jakarta tanggal 22 Maret 2010

Lie (PAN), Ade Komaruddin (GOLKAR), Arifin Panigoro (PDIP),<sup>28</sup> Kwik Gian Gie (PDIP)<sup>29</sup> dan Bachtiar Chamsjah (PPP).<sup>30</sup>

Amien Rais, Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid, Sri Sultan Hamengkubowono X dan Arifin Panigoro, Emil Salim, Ali Sadikin, Kemal Idris dan Sarwono Kusumaatmaja yang menghendaki B.J. Habibie berhenti sebelum masa jabatannya berakhir pada tahun 2002 mendukung aksi-aksi demonstrasi FKSMJ dan FORKOT yang menentang B.J. Habibie yang bertujuan menjatuhkan B.J. Habibie. Dalam kasus yang sama, Amien Rais, Akbar Tanjung, Bachtiar Chamsjah, Yusril Ihza Mahendra dan Arifin Panigoro yang menghendaki Presiden Abdurrahman Wahid berhenti sebelum masa jabatannya berakhir pada tahun 2004 mendukung aksi-aksi demonstrasi BEMSI yang bertujuan menjatuhkan Abdurrahman Wahid.

Sebaliknya, didukung oleh elit-elit partai politik yang menghendaki B.J. Habibie terus menjabat Presiden hingga masa jabatannya berakhir pada tahun 2002, —seperti, Wiranto, Fadel Muhammad, Yusril Ihza Mahendra, Ahmad Sumargono, Eggi Sudjana, Nurmahmudi Ismail, Didin Hafiuddin— HMI dan KAMMI yang mendukung B.J. Habibie melakukan aksi-aksi demonstrasi mendukung B.J. Habibie. Dalam kasus yang sama, didukung oleh elit-elit partai politik yang menghendaki Abdurrahman Wahid terus menjabat Presiden hingga masa jabatannya berakhir pada tahun 2004, —seperti Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, Alwi Sihab, Khofifah Indar Parawansa, Efendi Choirie, Marsillam Simanjuntak, Wimar Witoelar, Bondan Gunawan— BEMI yang mendukung Abdurrahman Wahid melakukan aksi-aksi demonstrasi mendukung Abdurrahman Wahid.

Dengan demikian dapat ditegaskan kembali bahwa HMI, KAMMI, FORKOT dan FKSMJ pada masa pemerintahan B.J. Habibie (Mei 1998-1999) atau BEMI dan BEMSI pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2002) dalam melakukan aksi-aksi demonstrasi semuanya beorientasi pada

<sup>28</sup> Dukungan Arifin Panigoro terhadap BEMSI terungkap dalam wawancara penulis dengan Taufik Riyadi, aktivis BEMSI, di Jakarta tanggal 01 April 2010.

<sup>29</sup> Dukungan Kwik Gian Gie terhadap BEMSI terungkap dalam wawancara penulis dengan Andre Rosiade, aktivis BEMSI, di Jakarta tanggal 25 Maret 2010.

<sup>30</sup> Dukungan Bachtiar Chamsjah terhadap BEMSI terungkap dalam wawancara penulis dengan Taufik Riyadi, aktivis BEMSI, di Jakarta tanggal 01 April 2010.

gerakan politik ketimbang gerakan moral. Adanya fakta-fakta: (1) HMI-KAMMI pendukung B.J. Habibie bekerjasama dengan para elit politik yang mendukung B.J. Habibie dalam mendukung B.J. Habibie; (2) FORKOT-FKSMJ penentang B.J. Habibie bekerjasama dengan para elit politik penentang B.J. Habibie dalam menentang B.J. Habibie; (3) BEMI pendukung Abdurrahman Wahid bekerjasama dengan para elit politik pendukung Abdurrahman Wahid dalam mendukung Abdurrahman Wahid; (4) BEMSI penentang Abdurrahman Wahid bekerjasama dengan para elit politik penentang Abdurrahman Wahid dalam menentang Abdurrahman Wahid, setidaknya membuktikan bahwa kerjasama gerakan mahasiswa dan elit politik semuanya berorientasi politik. Hal itu dapat dilihat dari semua bentuk aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI pada akhirnya bermuara pada persoalan legitimasi politik yang dimiliki oleh Presiden B.J. Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid. Padahal baik B.J. Habibie maupun Abdurrahman Wahid keduanya telah memiliki dasar legitimasi hukum, sudah konstitusional.

HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI yang lebih memilih strategi gerakan politik ketimbang strategi gerakan moral dalam mempertahankan atau menjatuhkan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid sangat dipengaruhi oleh hubungannya dengan para elit politik. Hal itu dapat dicermati dari pilihannya yang lebih tertarik menggunakan aksi-aksi massa yang dilakukan secara terorganisir dengan tujuan, strategi dan cara-cara yang dirumuskan secara jelas dan sadar yang melibatkan para elit politik. HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI yang membangun strategi gerakan massanya yang dimulai dari aksi-aksi massa kecil di kampus masing-masing lalu kemudian bergabung di luar kampus tidak bisa dipungkiri adanya keterlibatan elit politik. Quddus Salam, Aktivis BEMI, mengakui hal itu dengan mengatakan:

”Kita juga coba berkomunikasi tidak hanya dengan PKB, di PPP juga, di teman-teman PDI juga, tapi memang intensitasnya memang agak berbeda. Misalnya soal ketika kita masuk di DPR, waktu itu masih sidang BAMUS, saya masih ingat, dan waktu itu ada Arifin Panigoro, dan dia melihat kita, kita agak demonstratiflah yah, maklum mahasiswa, jadi kita agak menekan, kita menerobos waktu itu, yang waktu itu BAMUS sedang mengadakan rapat. Dengan kekuatan penuh kita bisa masuk ke dalam, nah, saya tidak tahu kenapa para petinggi anggota DPR waktu itu, kebingungan, dan mereka

agak gerah. Padahal menurut saya, ini menjadi satu bentuk simbol, bagaimana mereka berkomunikasi, baik itu secara sosial dan politik, itu bisa dilakukan, tapi mereka agak enggan waktu itu. Menurut saya, malah yang menerima lebih baik adalah partai-partai di luar ini, karena memang salah satu tuntutan kita waktu itu adalah bubarkan Golkar.”<sup>31</sup>

Amien Rais, Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid dan Sultan Hamengku Buwono X tetap dipercaya oleh kelompok-kelompok pergerakan yang menganut strategi gerakan politik. Kelompok-kelompok kritis lainnya yang menganut strategi gerakan massa seperti kelompok-kelompok gerakan mahasiswa sekalipun termasuk ke dalam kelompok yang paling politis hampir tetap tidak pernah mempersoalkan pilihan strategi gerakan elitis mereka. Meskipun Amien Rais, misalnya, tidak selalu hadir dan berbicara di depan aksi-aksi massa, atau Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid, Emil Salim, Ali Sadikin, Kemal Idris dan lain-lain yang tidak pernah terlihat memobilisasi massa dalam menentang B.J. Habibie, hal itu tidak dapat menjadi alasan untuk mengatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam gerakan politik untuk menjatuhkan B.J. Habibie. Sebab, selain mereka memiliki akses kepada organisasi massa, juga elit-elit politik, seperti Amien Rais, Megawati Soekarnoputri dan Abdurrahman Wahid memiliki organisasi massa dengan basis pendukung yang cukup besar, seperti PDI-P untuk Megawati Soekarnoputri, Muhammadiyah dan PAN untuk Amien Rais dan Nahdlatul Ulama (NU) dan PKB untuk Abdurrahman Wahid.

Selain faktor ideologi, faktor tidak adanya tokoh sentral mahasiswa dan faktor kompetisi di kalangan elit politik merupakan penyebab mengapa para aktivis mahasiswa selalu berhubungan dengan elit politik. Bertahannya ketokohan Amien Rais, Megawati Soekarnoputri dan Abdurrahman Wahid setidaknya untuk masa pemerintahan B.J. Habibie, karena di kalangan kelompok-kelompok gerakan mahasiswa sendiri tidak muncul tokoh-tokoh gerakan. Konsensus untuk tidak menokohkan di antara mereka sendiri merupakan satu-satunya penyebab mengapa tidak muncul tokoh-tokoh gerakan mahasiswa yang populer dari kalangan mahasiswa sendiri. Namun penyebab kesepakatan untuk

---

<sup>31</sup> Wawancara penulis dengan Quddus Salam, aktivis BEMI tahun 2000-2001 dari IAIN Sunan Ampel Jawa Timur di Jakarta tanggal 02 April 2010.

tidak menokohkan di antara mereka didasarkan pada pertimbangan politik, bukan pertimbangan moral.

Selama bertahun-tahun lamanya dan kelihatannya untuk selamanya, kesepakatan untuk tidak saling menokohkan bukan hanya telah menjadi trauma terhadap oportunisme yang menjangkiti para tokoh gerakan mahasiswa sebelumnya, tetapi juga merupakan upaya untuk melindungi diri dari kemungkinan adanya tokoh-tokoh gerakan mahasiswa yang "menjual" gerakan mahasiswa dengan cara konsesi politik dengan elit-elit politik. Oleh karena itu tidak adanya tokoh-tokoh gerakan mahasiswa dari kalangan mahasiswa sendiri membuat mereka harus menokohkan figur-figur politik populis yang ada, sekalipun memiliki perbedaan strategi perjuangan.

Meskipun para elit politik cenderung menggunakan pemilu sebagai jalan perjuangannya, namun faktor kompetisi di kalangan elit politik sendiri juga merupakan penyebab mengapa para aktivis mahasiswa selalu berhubungan dengan elit politik. Megawati Soekarnoputri dan Abdurrahman Wahid tetap ingin perjuangannya sesuai konstitusi dalam menjatuhkan B.J. Habibie, sedangkan Amien Rais menolak sistem baru seperti pembentukan Pemerintahan Sementara. Penolakan Amien Rais terhadap usulan sistem baru, seperti bentuk Pemerintahan Sementara didasarkan pada argumennya bahwa pemimpin yang mentalitasnya baik masih lebih baik ketimbang sistem yang baik tetapi dipimpin oleh pemimpin yang bermental kampung.<sup>32</sup>

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa kepentingan politik dan ideologi, serta perbedaan strategi dalam mendukung dan menentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid tersebut telah membuat kelompok-kelompok gerakan mahasiswa berkiblat kepada elit politik yang sejalan dengannya, sehingga tampak polarisasi di level elit politik kurang lebih sama dengan polarisasi yang berlangsung di level gerakan mahasiswa. Amien Rais, misalnya, yang menolak Pemerintahan Sementara pada masa B.J. Habibie berdasarkan kepentingan politik dan argumen-argumen rasionalnya ternyata tidak sejalan dengan kepentingan politik FORKOT dan FKSMJ. Sebab, bagi Amien Rais mengganti pejabat-pejabat politik lama yang tidak baik dengan pemimpin baru yang memiliki integritas

---

<sup>32</sup> Pernyataan itu disampaikan di dalam wawancaranya dengan Radio Republik Indonesia (RRI) pada tanggal 10 November 1998.

dan mentalitas yang baik masih lebih baik dari pada menerima Pemerintahan Sementara. Sebaliknya, kepentingan politik FORKOT dan FKSMJ adalah perubahan dari sistem lama ke sistem baru yang didasarkan pada asumsi bahwa sistem yang baik akan memaksa orang-orang yang ada di dalam sistem itu menjadi baik. Terjadinya polarisasi di level elit politik kurang lebih sama dengan polarisasi yang berlangsung di level gerakan mahasiswa, juga disebutkan oleh Eros Djarot, elit politik PDIP, penentang pemerintahan B.J. Habibie yang mengatakan :

“Polarisasi gerakan mahasiswa, itu cerminan polarisasi yang diatas (elit), polarisasi yang di atas inilah yang sebetulnya menjadikan polarisasi mahasiswa di bawah, karena ketidakjelasan arah reformasi dihancurkan oleh keinginan pribadi-pribadi”<sup>33</sup>

## 5.2. Peran Elit Dalam Gerakan Mahasiswa Pada Masa B.J. Habibie

Reformasi total yang mengagendakan pergantian pejabat politik dan perubahan sistem membuat elit-elit politik pendukung dan penentang B.J. Habibie (Lihat Tabel 5.3) berusaha menggalang kerjasama dengan berbagai organisasi massa terutama gerakan mahasiswa (Lihat Tabel 5.1). Kelompok aktivis yang “moderat”, seperti FKSMJ, Satgas KM-ITB dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Universitas Siliwangi yang strateginya mempercayai mekanisme dialog bersama-sama mendesak empat elit partai politik yang dianggapnya reformis, yaitu; Amien Rais (PAN), Megawati Soekarnoputri (PDI-P), Abdurrahman Wahid (PKB), Sri Sultan Hamengku Buwono X (Partai Golkar) untuk melakukan pertemuan di Ciganjur Jakarta Selatan.

Pertemuan terwujud karena adanya tekanan dan desakan mahasiswa. Setelah sehari-hari para aktivis dari Satgas KM-ITB, FKSMJ, dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Universitas Siliwangi “menduduki” halaman rumah Abdurrahman Wahid, akhirnya para tokoh itu bisa berdialog dalam satu meja pada tanggal 10 November 1998 yang mereka beri nama Dialog Nasional.<sup>34</sup> Niat mahasiswa untuk mempertemukan Amien Rais, Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman

<sup>33</sup> Wawancara dengan Eros Djarot, elit politik PDIP, penentang pemerintahan B.J. Habibie, Minggu tanggal 27 Juni 2010 di Jakarta.

<sup>34</sup> Suharsih dan Ign Mahendra K., *Bergerak Bersama Rakyat!: Sejarah Gerakan Mahasiswa dan Perubahan Sosial di Indonesia*, Yogyakarta: Resist Book, 2007, hal.119.

Wahid, Sri Sultan Hamengku Buwono X bermula ketika melakukan demonstrasi gabungan pada tanggal 28 Oktober 1998. Dorongan untuk melakukan dialog ini lebih diperkuat oleh adanya gejala persiapan "perang sipil" yang ditandai oleh kehadiran Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa) yang oleh para aktivis mahasiswa dan tokoh oposisi dirancang oleh tentara dan elit politik rezim Orde Baru yang ingin mempertahankan kekuasaannya.<sup>35</sup> Tentang adanya persiapan "perang sipil", Ahmad Sumargono, aktivis Islam dan elit politik pendukung B.J. Habibie, mengatakan:

"Saya tidak punya hubungan emosional dengan Habibie, ketika dia mendapat hinaan, Habibie biadab, Habibie turun. Pada masa peralihan itu, saya dengan kawan-kawan, dengan kekuatan-kekuatan Islam, merencanakan untuk menembus ini, kita usir orang-orang yang ada di DPR. Saya pada waktu itu sebagai Korlap, MS. Ka'ban sebagai Wakil Korlap menyerbu Senayan. Kita datang ke sana, kita turun, dan kita kuasai, kita cuma sehelai tambang gitu, sudah berhadapan, ada satu orang yang mukul saja, akan terjadi pertumbuhan darah. Itu sampai salah satu seorang tokoh dari Aceh teriak-teriak, tapi tidak ada gitu-gitu. Kemudian pada saat kita menyerbu, kita dapat selebaran dari teman-teman dari PKS, waktu itu masih bernama gerakan Tarbiyah, pada saat itu mereka bikin acara di Al Azhar, pada waktu yang sama, bikin selebaran bahwa pertemuan di Senayan dibatalkan, dipindahkan ke Al Azhar, di sana pembicara Amien Rais. Politik apa ini,

<sup>35</sup> Delapan isi Deklarasi Ciganjur, yaitu: (1) Menghimbau kepada semua pihak agar tetap menjunjung tinggi terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa secara utuh dan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam Negara Kebangsaan dan Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Para pemimpin formal maupun informal haruslah konsisten dengan semangat ini; (2) Mengembalikan kedaulatan rakyat dan memberdayakan lembaga perwakilan sebagai penjelmaan aspirasi rakyat, yang mencerminkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan penguasa; (3) Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sebagai asas perjuangan sebagai proses pembangunan bangsa, ke arah masyarakat yang adil dan sejahtera melalui cara-cara yang demokratis. Dalam rangka itu, haruslah dilakukan desentralisasi pemerintahan sesuai dengan kemampuan daerah dan ditetapkan *refund sharing* (perimbangan keuangan) yang adil antara pemerintah pusat dan daerah; (4) Agar pelaksanaan reformasi diletakkan dalam perspektif kepentingan generasi baru bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan bangsa di masa yang akan datang; (5) Segera dilaksanakannya Pemilu yang jujur dan dilaksanakan oleh pelaksana independen, dimana panitia pelaksanaan (Panpel) terdiri dari peserta Pemilu dan diawasi oleh tim independen. Pemilu merupakan jalan demokratis untuk mengakhiri pemerintahan transisi yang dipimpin oleh B.J. Habibie, sekaligus menjadi cara untuk menetapkan pemerintahan yang baru secara legitimate, selambat-lambatnya dalam tiga bulan setelah Pemilu Mei 1999 berlangsung, pemerintah baru sudah harus dibentuk melalui SU MPR; (6) Penghapusan Dwi Fungsi ABRI secara bertahap paling lama enam tahun dari tanggal pernyataan ini dibacakan, dan dalam rangka mewujudkan masyarakat madani; (7) Dilakukan usaha yang sungguh-sungguh dan tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk menghapus dan mengusut pelaku KKN, diawali dengan pengusutan harta kekayaan Soeharto, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; (8) Mendesak seluruh pengamanan swakarsa SI MPR untuk segera membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing agar tidak memperkeruh suasana. Lihat Suharsih dan Ign Mahendra K., *Ibid.*, hal.120.

saya bingung, kalau kita kan gak ada kepentingan apa-apa. Solidariti keumatan.<sup>36</sup>

Para aktivis yang memprakarsai pertemuan ini menganggap bahwa mekanisme dialog masih diperlukan sebagai upaya untuk menghindari kekerasan politik. Hal itu dapat dicermati dari delapan butir isi Deklarasi Ciganjur yang salah satunya adalah mendesak seluruh Pam Swakarsa SI MPR membubarkan diri. Deklarasi Ciganjur mencerminkan adanya kesepakatan antara elit politik yang menolak B.J. Habibie dengan aktivis mahasiswa yang berhaluan moderat atas pelaksanaan SI MPR.<sup>37</sup> Perbedaannya hanyalah pada soal akhir masa jabatan Presiden B.J. Habibie dimana para aktivis mahasiswa yang bergabung di dalam FKSMJ, Satgas KM-ITB dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Universitas Siliwangi tetap menghendaki B.J. Habibie berhenti pada bulan Agustus 1999. Sedangkan keempat deklarator Ciganjur itu hanya setuju percepatan Pemilu yang jujur dan adil di bawah penyelenggara dan pengawas independen. Keempat tokoh itu sepakat bahwa pemilu: (1) merupakan cara paling demokratis untuk mengakhiri pemerintahan transisi yang dipimpin B.J. Habibie; (2) cara tepat untuk menetapkan pemerintahan legitimate.

Sebagai upaya untuk mempercepat masa jabatan B.J. Habibie, peserta Dialog Nasional sepakat pemerintahan baru sudah terbentuk melalui Sidang Umum MPR selambat-lambatnya tiga bulan setelah Pemilu pada bulan Mei 1999. Seperti halnya Soeharto yang tidak perlu mengakhiri kekuasaannya hingga masa akhir jabatannya pada tahun 2002, elit-elit penentang B.J. Habibie juga sepakat bahwa B.J. Habibie harus berhenti pada bulan Agustus 1999 sebelum masa jabatannya berakhir pada tahun 2002. Oleh karena itu pertemuan empat tokoh ikon oposisi Orde Baru tersebut, yang diperkuat oleh kehadiran berbagai elemen elit lainnya, seperti Kemal Idris dan Ali Sadikin (militer), Arifin Panigoro dan Setiawan Jodi (pengusaha), Eros Djarot (budayawan), Wimar Witoelar (aktivis sosial) dalam acara Dialog Nasional memberi isyarat adanya hubungan antara kelompok elit politik yang menolak B.J. Habibie dengan kelompok gerakan mahasiswa yang juga ingin agar B.J. Habibie yang disebutnya sebagai Presiden

<sup>36</sup> Wawancara penulis dengan Dr. Ahmad Sumargono, SE., MM, aktivis Islam dan elit politik pendukung B.J. Habibie di Jakarta pada tanggal 01 April 2010

<sup>37</sup> Lihat Lampiran 7.

transisi secepatnya mengakhiri kekuasaannya melalui pengunduran diri atau percepatan pemilu.

**Tabel 5.5:**  
**Partai Politik Pendukung dan Penentang B.J. Habibie**

Partai Politik Pendukung B.J. Habibie	Partai Politik Penentang B.J. Habibie
1. PK 2. GOLKAR 3. PAN	1. PDI-P 2. PKB 3. PUDI 4. PRD

**Sumber:** Diolah oleh penulis dari wawancara dengan Akbar Tanjung di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2009, wawancara penulis dengan Ahmad Sumargono, Aktivist Islam pendukung B.J. Habibie di Jakarta pada tanggal 01 April 2010 dan wawancara penulis dengan Sarbini, mahasiswa Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG) Jakarta dan Aktivist FKSMJ, tanggal 27 Maret 2010 di Jakarta

Meskipun demikian tidak semua elit politik penentang B.J. Habibie dan aktivis gerakan mahasiswa menerima kesepakatan itu. Eros Djarot elit politik PDIP penentang B.J. Habibie mengatakan :

“Pada perhelatan Ciganjur, memang ada konspirasi yang tidak sehat, konspirasi untuk berkuasa. Saya juga udah punya *feeling*, pasti ada yang berkhianat dengan cita-cita reformasi. Jadi sebetulnya, keinginan berkuasa yang berlebihan inilah yang membuat polarisasi itu semakin membesar. Contohnya, begitu kita disuruh buru-buru ikut Pemilu, disinilah terjadi perpecahan, Amien Rais membentuk kekuatan sendiri, Gus Dur membentuk kekuatan sendiri, Megawati membentuk kekuatan melawan Orde Baru itu, jadi terpolarisasi. Yang tadinya tiga serangkai, akhirnya jadi satu satu tiga. Maka terjadilah polarisasi, membuat gerakan mahasiswa juga bingung. Yang mana nih? Yah, yang kekiri-kirian ke PDIP lah. Yang kekanan-kananan ke Habibie. Jadi sangat sinkronistik dan pragmatis berdasarkan pada pemikiran-pemikiran sempit berkuasa saat itu.”<sup>38</sup>

Bahkan sebagian aktivis mahasiswa termasuk FKSMJ yang turut serta memprakarsai dialog itu melihat kesepakatan itu sebagai cara untuk melegitimasi SI-MPR dan pemerintahan B.J. Habibie, serta mempertahankan kursi ABRI di legislatif. Di satu sisi umumnya aktivis non-FKSMJ tidak menolak mekanisme

<sup>38</sup> Wawancara dengan Eros Djarot, elit politik PDIP, penentang pemerintahan B.J. Habibie, Minggu tanggal 27 Juni 2010 di Jakarta.

Dialog Nasional tersebut, tapi lain sisi mereka juga tidak menerima hasil dialog itu setelah melihat hasil dialog cenderung elitis dan kompromis.

Sikap penolakan FKSMJ terhadap hasil Dialog Nasional tersebut sebagai wujud konsistensi dari kelompok gerakan mahasiswa ini menjaga agenda reformasi. FKSMJ menolak Deklarasi Ciganjur, karena melihat isi deklarasi itu tidak membukakan jalan bagi pemberhentian Presiden B.J. Habibie di luar mekanisme konstitusional. Padahal keinginan FKSMJ adalah B.J. Habibie berhenti dari jabatannya seperti layaknya Soeharto berhenti dari jabatannya. Dasar penolakan FKSMJ terhadap B.J. Habibie bukan pada kinerja pemerintahan B.J. Habibie yang terkesan lamban dalam melaksanakan keseluruhan agenda reformasi, tapi semata-mata karena B.J. Habibie masih dianggapnya sebagian yang tidak terpisahkan dari Soeharto. Bagi para aktivis FKSMJ pemberhentian B.J. Habibie di tengah jalan merupakan cara pintas satu-satunya dalam memutuskan rantai Orde Baru memasuki Orde Reformasi. Sarbini, Aktivis FKSMJ, mengatakan:

”Mungkin kita melihat pada nuansa era itu, dimana pada itu kita sebagai mahasiswa artinya irisannya itu sangat tidak politis. Pada saat itu memang berbicara moral dan karena mahasiswa itu dalam perspektif, dia tidak abu-abu, dia mainnya hitam-putih saja, tidak melihat kalkulasi di elite karena memang tidak banyak mahasiswa yang punya irisan dengan elit. Sederhana saja kesimpulan pada saat itu bahwa setelah FKSMJ menduduki MPR dan DPR pada era itu Presiden Soeharto lengser dan digantikan oleh Habibie. Wacana di kita pada saat itu adalah Habibie menjadi kaki tangan Soeharto, anak kesayangan Soeharto. Landasan itulah kita berpikir bahwa kalau diserahkan ke Habibie dengan analisa mahasiswa yang sangat sederhana bahwa artinya ini kepanjangan dari sistem Orde Baru yang sedang kita lawan pada saat itu. Jadi bahasa yang sangat sederhana kalau menurut kami adalah pada era itu Habibie adalah bagian dari Orde Baru bagian dari Soeharto yang kita mesti rombak. Itu kan baru kepalanya, kaki tangannya kan belum. Salah satu kaki tangannya itu adalah Habibie. Nah itulah akhirnya kita tetap melawan dan kita tetap kritis terhadap keputusan yang dikeluarkan Presiden Soeharto.”<sup>39</sup>

Namun justru penolakan itulah yang membuka ruang kelompok elit lainnya berusaha merangkul simpati aktivis gerakan mahasiswa yang menolak bagian

<sup>39</sup> Wawancara penulis dengan Sarbini, mahasiswa Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG) Jakarta dan Aktivis FKSMJ, tanggal 27 Maret 2010 di Jakarta.

penting dari Deklarasi Ciganjur, sehingga polarisasi gerakan mahasiswa tidak terhindarkan. Bahtiar Firdaus, Ketua BEM UI periode 1998-1999 mengatakan :

“*Pertama* karena perbedaan ideologi gerakan, itu pasti, artinya begini, itukan zaman ketidakpastian, zaman tiba-tiba semuanya serba boleh, *euforia*, padahal sebelum itu kita masing-masing dididik oleh senior-senior kita, mentor-mentor kita, dengan cara “masih bawah tanah” gerakannya, musuh kita Soeharto, setelah musuh besarnya sudah tumbang, kita gagap menangani, siapa musuh bersamanya, apa kepentingan bersama, apalagi ideologi berbeda-beda. *Kedua*, karena memang ketika itu, kita melihat informasi itu simpang siur, kabar-kabar berseliuran, bahkan menjurus fitnah, membuat gerakan ini, didalangi ini, gitu loh, bukan hanya kita memandang mereka, mereka juga memandang kita seperti itu, sementara kita tidak bisa ketemu tiap saat mengadakan komunikasi dan koordinasi, bahkan kalau kita ketemu seseorang sudah ter-*frame* gitu, ini orang, ini.. ini.. ini.. gitu loh...ini beda dengan di UI karena memang kalau di UI kita bisa berbicara dengan teman-teman beda aliran karena kita kenal, kita dekat, saling ketemu. Tetapi kalau teman-teman lintas kampus sulit, jadi ini masalah kepercayaan (*trust*). *Ketiga*, tentunya ini khas anak muda gitu kan, ada gerakan yang mau seksi lah,..artinya semakin heroik dalam pergerakan, semakin fenomenal lah, bagi kebanggaan dirinya, bagi kelompoknya, bagi kebanggaan junior-juniornya. Di sisi lain ada yang tidak mau seperti itu, maunya yang penting kita berbuat. Ya, sebenarnya ini melanjutkan tradisi mahasiswa yang dulu, mahasiswa tahun 90-an, ada kelompok diskusi, ada kelompok aksi. Mentor-Mentor dari kelompok diskusi dan kelompok aksi berbeda dalam pendekatannya. *Keempat*, lembaga formal dan informal, artinya, lembaga formal itu di anggap dianggap birokratis oleh teman-teman informal, misalnya mereka mengajak aksi, tidak bisa saya begitu saja aksi, walaupun saya sebagai Presiden Mahasiswa, karena kita terbatas, karena harus dirapatkan dulu.. waaahh,.. lambat.. gak ini, ga itu...menurut mereka. Padahal maksud kita bukan melambat-lambatkan, mengumpulkan orang kan tidak bisa sekejap. Dan teman-teman informal itu tidak punya mekanisme ini dan tidak bisa memahami, karena memang kulturnya berbeda. Organisasinya berbeda. *Kelima*, karena kita gak terbiasa menjadi berbeda. Maksud saya begini, jangan-jangan kita, sudah membiarkan Orde Baru sukses meracuni pikiran kita, bahwa semuanya itu harus harmoni, harus satu, padahal sebenarnya kita hidup dalam negara yang normal, perbedaan-perbedaan itu harus kita terima. Dengan kita bagaimana?, kita gagap sejak awal, pokoknya kita tunggal. asas tunggal, organisasi tunggal, gerakan ini tunggal, wartawan tunggal, padahal setelah pecah, kita gagap. Maunya kita bersatu, tapi dipaksain bersatunya.”<sup>40</sup>

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bahtiar Firdaus, Ketua BEM UI periode 1998 – 1999, Senin, 29 Maret 2010, di Depok.

Dalam pandangan Heberle gerakan FKSMJ untuk memberhentikan B.J. Habibie di tengah jalan sebagai cara pintas mengakhiri Orde Baru dan memasuki orde baru berikutnya, yaitu Orde Reformasi sudah termasuk ke dalam gerakan yang lebih luas dari pada sekedar kepentingan politik sesaat yaitu sekedar mengganti pejabat politik. Menggunakan konsep gerakan sosial Heberle, aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan FKSMJ untuk memberhentikan B.J. Habibie merupakan bagian dari ragam usaha kolektif untuk mengadakan perubahan tertentu pada lembaga-lembaga sosial atau menciptakan Orde Baru.<sup>41</sup> karena menurut Eric Hoffer gerakan sosial bertujuan untuk mengadakan perubahan.<sup>42</sup>

Berbeda dengan sikap keempat tokoh Deklarator Ciganjur yang cenderung masih kompromistik, Barisan Nasional (Barnas), sebuah organisasi kelompok elit yang didirikan oleh para abangan sekuler dan Islamophobia, sangat tegas menolak B.J. Habibie. Barisan Nasional (Barnas), sejak bulan Oktober 1998 sudah meminta B.J. Habibie turun dari jabatannya dan menggantinya dengan Pemerintahan Transisi yang disebutnya sebagai Komite Rakyat Indonesia (KRI).

Tercatat sejumlah elit yang memperkuat Barnas, seperti Kemal Idris, Sarwono Kusumaatmaja, Siswono Yudhohusodo, Usep Ranawijaya, Sri Edi Swasono, Sukmawati Soekarnoputri, Roch Basuki, Permadi, Hariadi Darmawan, Arifin Panigoro, Rahmat Witoelar, Ratna Sarumpaet, Romo Sandyawan. Sedangkan elit-elit yang mereka inginkan duduk dalam KRI antara lain: Kemal Idris, Megawati, Sukmawati Soekarnoputri, Ali Sadikin, Ratna Sarumpaet, Sarwono Kusumaatmaja, Siswono Yudohusodo, Rahmat Witoelar dan lain lain. Barnas bersikap sangat tegas terhadap B.J. Habibie. Terbukti mereka mengancam mengerahkan massa untuk menduduki gedung DPR/MPR seperti yang dilakukan gerakan mahasiswa dan rakyat pada tanggal 18-22 Mei 1998 bila B.J. Habibie tidak segera turun dari jabatannya. Mereka menolak Sidang Istimewa MPR terutama menyangkut Pemilu karena bakal merugikan kelompok mereka.

Penolakan Barnas terhadap Presiden B.J. Habibie bukan hanya sekedar mencerminkan adanya konflik politik khususnya perebutan kekuasaan, tapi juga konflik ideologis antara elit-elit yang berideologi Islam dan elit-elit yang

<sup>41</sup> Heberle dalam Asep Setiawan, *Gerakan Sosial*, Jakarta: Jurusan Ilmu Politik, FISIP UMJ, 1998, hal.10.

<sup>42</sup> Eric Hoffer *Ibid.*, hal.

beraliran nasionalis, kebangsaan dan Kristen. Barnas, misalnya didukung oleh elit politik yang berhaluan nasional, kebangsaan dan elit-elit Katolik, seperti dari Pensiunan TNI dan dari kelompok CSIS, sedangkan B.J. Habibie didukung oleh ormas Islam, seperti ICMI, KISDI dan lain-lain (Lihat Tabel 5.6).

**Tabel 5.6:**  
**Kelompok Ormas/LSM Pendukung dan Penentang B.J. Habibie**

<b>Kelompok Ormas/LSM Pendukung B.J. Habibie</b>	<b>Kelompok Ormas/LSM Penentang B.J. Habibie</b>
2. MUI	1. Negara Indonesia Timur
3. PPMI	2. WIRAGAMA/PNI
4. ICMI	3. GKPB
5. Furkon	4. GRB
6. KISDI	5. SIAGA
7. Humanika	6. GRN
8. GPI	7. PBN
9. BKPRMI	8. BARNAS
10. GPA	9. GMNU
11. KPB (Kempok Pendekar Banten)	10. KPM
12. Bakor Pesanteren Indonesia	
13. Forum Silaturahmi Ulama-Habib	
14. GPII	
15. DDII	
16. PI	
17. PMI	
18. AMII	
19. PM	
20. PIB	

**Sumber:** Diolah oleh penulis dari wawancara dengan Ahmad Sumargono, Aktivist Islam pendukung B.J. Habibie di Jakarta pada tanggal 01 April 2010, wawancara penulis dengan Sarbini, mahasiswa Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG) Jakarta dan Aktivist FKSMJ, tanggal 27 Maret 2010 di Jakarta, wawancara penulis dengan Eggi Sudjana (PPMI) di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2010.

Oleh karena itu rencana Barnas mengakhiri pemerintahan B. J. Habibie pada Sidang Istimewa MPR sejak kejatuhan Soeharto membuat tokoh-tokohnya seperti Ali Sadikin, Kemal Idris, dan Meliono Suwondo (Wakil Bendahara Umum PDI-P) berurusan dengan pihak kepolisian. Menurut Sri Bintang Pamungkas pemanggilan mereka oleh pihak kepolisian terkait dengan keikutsertaannya dalam Komunike Bersama pada tanggal 12 November 1998 yang menyerukan

pembentukan MPR Reformasi dengan rekomendasi pembentukan Presidium sebagai pemerintahan transisi.<sup>43</sup>

Konflik politik antara elit pendukung dan penentang B.J. Habibie yang didasarkan kepada kepentingan kekuasaan dan kepentingan ideologi membuat kelompok-kelompok gerakan mahasiswa tertentu seperti KAMMI dan Gerakan Kelompok Orde Baru (GKOB) bereaksi menolak keterlibatan tokoh-tokoh Barnas dengan alasan bukan lagi murni gerakan mahasiswa.<sup>44</sup> Terlebih lagi setelah kemunculan elit politik dan aktivis mahasiswa yang sangat radikal menentang B.J. Habibie.

Kelompok aktivis mahasiswa yang menamakan diri sebagai Revolusi Sekarang Juga (RSJ) dalam rapatnya pada tanggal 5 Nopember 1998 berniat melakukan makar dengan cara menggulingkan kekuasaan Presiden B.J. Habibie. Rencana makar RSJ tersebut diputuskan dalam rapat RSJ yang melibatkan 18 organisasi penentang B.J. Habibie. Undangan RSJ ditandatangani oleh tokoh RSJ, Roch Basuki pendukung PDI-P, kepada 18 wakil organisasi penentang B.J. Habibie, yaitu: (1) Adian Napitupulu (FORKOT); (2) Syafiq (FAMRED); (3) Sarbini (FKSMJ); (4) Indah (KOMRAD); (5) Lexy Lumentut (Negara Indonesia Timur); (6) Umam (GMNU); (7) Rozy Munir (GKPB); (8) Usep Ranuwihardja (WIRAGAMA/PNI); (9) Kun Sukarno (GRB); (10) Ratna Sarumpaet (SIAGA); (11) Hariadi Darmawan (GRN); (12) Benny Fatha (PBN); (13) Supadan (PDI); (14) Baskara (GMNI); (15) Syaiful Sulun (BARNAS); (16) Theo Syaifei (BARNAS/PDI Mega/Tokoh Kristen). Tentang rencana makar yang melibatkan gerakan mahasiswa, Sarbini aktivis FKSMJ, mengatakan:

” Kepentingannya menjalin komunikasi ya biar kepentingan kita mereka juga tahu. Apa sih keinginan kita? saya sempat dengar ada rumor yang seperti itu. Tapi terus-terang saya belum punya bukti, hanya yang terakhir terus-terang saja yang membuat saya sakit hati dalam gerakan, yang akhirnya saya disebut makar dulu karena saya jadi satu-satunya mahasiswa yang dipanggil Mabes Polri, karena dianggap makar. Itu ada latar belakangnya, jadi waktu itu saya ada dialog di Barnas, waktu itu saya dipanel oleh Eep sama Deny. Nah setelah itu saya di minta nomor telepon oleh orang-orang tertentu, setelah itu saya di telpon. Di telpon saya diajak pertemuan di Kartika Chandra, nah di situ ada sekelompok orang tua, waktu

<sup>43</sup> Wawancara penulis dengan Sri Bintang Pamungkas di Cibubur tanggal 02 April 2010.

<sup>44</sup> Irine H. Gayatri dan Moch. Nurhasim, “Reformasi Atau Mati!: Gerakan Mahasiswa Pasca Soeharto”, dalam Muridan S. Widjojo et.al, *Ibid.*, hal.225-226.

itu memang kita mau membuat agenda besar yang akhirnya menjadi ‘Tragedi Semanggi’. Jadi saya diundang, waktu itu yang saya tahu dari teman-teman kalau Kartika Chandra itu Hotelnya Tentara Baret Merah. Jadi saya hati-hati, jadi saya ajak teman namanya Dandi. Waktu itu saya menjelaskan ke teman-teman saya diundang, ini bagaimana?. Akhirnya saya datang ke sana. Lalu mereka bercerita, ada aksi besar nanti dan membutuhkan biaya sekian, terus ada orang Indonesia yang lama di Prancis datang ke situ, konon cerita bahwa dia yang mensupport dananya untuk gerakan itu. Saya tanya ke teman-teman yang ada di situ, ya ada orang LSM, institute kampus, ikatan alumni yang sebenarnya kita tahu ada elit-elit tertentu. Saya tanya organ saya ada tidak di situ pak? Oh semuanya ada di sini jawab mereka. Saya bilang gak jelas ini urusannya, ya sudah saya minum saja di situ dan akhirnya saya tutup pembicaraan. Nah disitu saya *shock*, angka segitu keluar, Rp. 3 Milyar yang teman-teman tidak tahu darimana keluarnya. Kalau menurut saya ini agak aneh dan akhirnya saya mengundurkan diri dari pertemuan itu. Nah setelah kejadian Semanggi, beberapa hari kemudian saya dipanggil diundang Polisi bahwa saya bagian dari pertemuan itu. Saya dicecar duit anda dari mana? Padahal sebelumnya yang duluan dituduh melakukan makar adalah Sukmawati, Kemal Idris dll, mahasiswa kan hanya saya yang diundang. Ternyata dari situ pertemuannya, saya ingat betul saya didampingi (Alm.) Munir pada saat itu lewat perantara Suara Ibu Peduli, Karlina Leksono didampingi di sana. Di situlah, saya tahu ternyata ada kekuatan kekuatan tertentu untuk memanfaatkan gerakan (mahasiswa) ini untuk orang-orang tertentu.”<sup>45</sup>

Penahanan sejumlah tokoh RSJ terkait ditemukannya dokumen rencana makar terhadap pemerintahan B.J. Habibie, berupa TOR Penyusunan Infrastruktur Revolusi (TOR PIR) untuk melakukan Revolusi Rakyat dalam rangka merebut kekuasaan dari tangan B.J. Habibie. Setidaknya ada empat isi pokok dari dokumen RSJ tersebut, yaitu: (1) menciptakan suasana revolusioner yang siap dengan membangun infrastruktur revolusi yang solid; (2) pembentukan Komite Rakyat Indonesia (KRI) sebagai upaya menciptakan suasana revolusioner yang siap dengan membangun infrastruktur revolusi yang solid; (3) pemetaan “Musuh Bersama” dan “Kawan Revolusioner”; (4) demonstrasi besar-besaran pada tanggal 12 Nopember dipusatkan di Jakarta dengan cara menduduki gedung DPR/MPR; (5) merebut sarana vital di daerah-daerah; (6) aksi harus dipelopori oleh komponen FORKOT, FORBES, FAMRED, KOMRAD, AMARA, KMB, dan semua unsur yang ikut rapat RSJ.

Sikap tegas Barnas yang menolak B.J. Habibie dan rencana RSJ melakukan makar terhadap pemerintahan B.J. Habibie membuktikan adanya kepentingan

<sup>45</sup> Wawancara penulis dengan Sarbini, Aktivistis FKSMJ, di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2010.

politik dan kepentingan ideologis dari elit-elit penentang Orde Baru dan penentang B.J. Habibie yang masuk dalam gerakan mahasiswa. Selain itu juga menegaskan bahwa aksi-aksi dari gerakan mahasiswa, seperti FORKOT dan FKSMJ tidak murni lagi sebagai gerakan moral mahasiswa. Kerjasama antara kelompok elit pendukung B.J. Habibie, seperti Ahmad Sumargono, Fadel Muhammad, Eggi Sudjana dan Adi Sasono dengan gerakan mahasiswa pendukung B.J. Habibie, seperti HMI, KAMMI dan HAMMAS. Sebaliknya kerjasama antara kelompok elit penentang B.J. Habibie, seperti Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, Megawati, Abdurrahman Wahid, Eros Djarot dan Sri Bintang Pamungkas dengan gerakan mahasiswa penentang B.J. Habibie, seperti FORKOT dan FKSMJ disebabkan oleh adanya kesamaan kepentingan politik dan kepentingan ideologi.

Meluasnya gerakan massa menuntut mundur Presiden B.J. Habibie, seperti di Jakarta, Solo, Purwokerto, Denpasar, Ujung Pandang, Yogyakarta, Medan, Semarang, Salatiga dan Bandung dimana sebagian kelompok-kelompok gerakan mahasiswa terlibat di dalamnya didukung oleh sejumlah faktor kondisi obyektif dan subyektif.<sup>46</sup> Termasuk ke dalam kondisi obyektif adalah: (1) di satu sisi Presiden B.J. Habibie tidak memiliki keberanian mencabut Dwi Fungsi ABRI dan mengadili Soeharto demi menjaga hubungannya dengan militer, tetapi di lain sisi kebijakannya tentang referendum Timor Timur yang dianggap TNI sebagai suatu kesalahan terbesar.<sup>47</sup> Padahal mencabut Dwi Fungsi ABRI dan mengadili Soeharto adalah dua agenda reformasi yang sensitif politik yang dapat digunakan B.J. Habibie untuk merangkul elemen masyarakat pendukung demokrasi dan pendukung reformasi; (2) meluasnya pengaruh elit oposisi B.J. Habibie ke dalam kelompok-kelompok gerakan massa terutama ke dalam gerakan mahasiswa yang tidak puas terhadap pelaksanaan agenda reformasi; (3) Partai Golkar sebagai partai pendukung B.J. Habibie gagal memenangkan Pemilu 1999.<sup>48</sup> (4) kesiapan

<sup>46</sup> Suharsih dan Ign Mahendra K, *Bergerak Bersama Rakyat: Sejarah Gerakan Mahasiswa dan Perubahan Sosial di Indonesia*, Yogyakarta: CV. Langit Aksara, 2007, hal. 110-119.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Letjend.(Purn.) Fachrul Rozi mantan Kasum dan Wakil Panglima TNI, Selasa, 22 Juni 2010 di Jakarta.

<sup>48</sup> Pada Pemilu 1999, PDI-P berada di urutan pertama dengan suara 33,7% (35.706.618 suara) dan 153 kursi, sedangkan Partai Golkar berada di urutan kedua dengan perolehan suara 22,4% (23.742.112 suara) dan 120 kursi, disusul PKB 12,6% (13.336.963 suara dan 51 kursi), PPP 10,7% (11.330.387 dan 58 kursi), PAN 7,12% (7.528.956 dan 34 kursi). Lihat KPU 1999.

para elit oposisi (elit tandingan), seperti Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Amien Rais mengambil alih lembaga-lembaga politik strategis, seperti Amien Rais yang terpilih sebagai Ketua MPR dan Megawati Soekarnoputri yang partainya, PDIP menjadi pemenang Pemilu 1999.

Sedangkan yang masuk ke dalam faktor subyektif, yaitu: (1) kegagalan Presiden B.J. Habibie meyakinkan para elit oposisi bahwa transisi demokrasi harus dilewati secara gradual untuk menghindari meluasnya kekacauan politik; (2) ketidakmampuan elit pendukung Presiden B.J. Habibie memperluas akses politiknya hingga kelompok-kelompok gerakan mahasiswa radikal. Para elit politik pendukung B.J. Habibie tampaknya tidak terlalu yakin bahwa kelompok-kelompok oposisi radikal memilih "cara-cara inkonstitusional" melalui gerakan aksi-aksi massa sebagai satu-satunya pilihan yang dianggap sebagai jalan keluar bagi reformasi total; (2) ketidakmampuan Presiden B.J. Habibie menjelaskan kepada gerakan mahasiswa konservatif dan radikal bahwa pulihnya krisis ekonomi dan demokratisasi lembaga-lembaga politik adalah hasil dari kebijakan politiknya yang bersumber dari kepemimpinan politiknya.

### **5.3. Peran Elit dalam Kejatuhan Abdurrahman Wahid**

Peranan elit dalam gerakan mahasiswa untuk menjatuhkan Abdurrahman Wahid paling dominan berasal dari faksi politik baru di tubuh DPR/MPR yang kemunculannya dapat dianggap secara tiba-tiba menjelang Sidang Umum MPR 1999. Faksi politik yang dimotori oleh Amien Rais itu dan dikenal luas dengan istilah 'Poros Tengah' memiliki kekuatan yang cukup signifikan. Sebab, bukan hanya sebelumnya menjadi pendukung kuat dalam menaikkan Abdurrahman Wahid ke kursi Presiden pada Pemilu 1999, tetapi juga merupakan kekuatan politik yang mampu menurunkan kembali Abdurrahman Wahid dari jabatan Presiden melalui Sidang Istimewa MPR.

Istilah Poros Tengah sendiri memiliki beberapa versi kemunculannya, empat diantaranya, yaitu: (1) istilah Poros Tengah menurut Zarkasih Nur muncul dalam diskusinya dengan Faisal Baasyir dan Husni Thamrin, ketiganya politisi PPP; (2) Poros Tengah adalah ide Amien Rais yang dilontarkan dalam dialog politik yang diselenggarakan oleh LIPI ; (3) Poros Tengah merupakan hasil diskusi Soetjipto Wirosardjono dengan Chairil Anwar dalam forum PPSK di Yogyakarta;

**Universitas Indonesia**

(4) Poros Tengah menurut Mahfud MD berasal dari gagasan Fraksi Poros Tengah yang muncul dalam pembicaraan sejumlah tokoh di Yogyakarta pada tanggal 21 Juli 1999 yang dihadiri oleh Mahfud MD, Amien Rais, Nurmahmudi Ismail, Fuad Bawazier, dan sejumlah tokoh lainnya.

Namun menurut Untung Wahono latar belakang kemunculan Poros Tengah setidaknya memiliki tiga tujuan yang saling melengkapi, yaitu: (1) dalam rangka menarik Amien Rais ke kubu Islam; (2) dalam rangka memunculkan kekuatan politik alternatif berbasis Islam; (3) memecah kebekuan alternatif Calon Presiden RI pasca Pemilu 1999; (4) untuk memberikan jaminan berjalannya agenda reformasi melalui pendekatan penawaran kekuatan.<sup>49</sup> Oleh karena itu keterlibatan sejumlah elit politik, seperti Mahfud MD (PKB), Amien Rais (PAN), Nurmahmudi Ismail (PKS), Fuad Bawazier (PAN), Zarkasih Nur (PPP), Faisal Baasyir (PPP), Husni Thamrin (PPP), Soetjipto Wirosardjono (intelektual kampus), Chairil Anwar (budayawan), serta LIPI dan PPSK dalam proses kemunculan Poros Tengah dapat ditegaskan bahwa Poros Tengah merupakan wadah untuk menampung berbagai kepentingan politik dan kepentingan ideologis (Lihat Tabel 5.4).

Poros Tengah sendiri pada awalnya tidak memiliki skenario tunggal untuk mengajukan Abdurrahman Wahid sebagai Calon Presiden. Sebab, di kalangan Poros Tengah juga ada gagasan untuk meng-*goal*-kan B.J. Habibie dalam pencalonan dan pemilihan Presiden. Namun konstelasi kekuatan politik di Poros Tengah sendiri tidak semuanya sepakat dengan B.J. Habibie, sebagaimana tercermin dari hasil *voting* terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Bahkan setelah kekalahan B.J. Habibie yang ditandai oleh penolakan MPR terhadap laporan pertanggungjawabannya, Poros Tengah sempat mendorong Amien Rais untuk tampil sebagai Calon Presiden. Namun Amien Rais yang sedang terjebak pada posisi dan situasi dilematis harus menolak usul pencalonannya oleh Poros Tengah. Penolakan Amien Rais itu dapat dikaitkan dengan posisinya yang sudah terpilih sebagai Ketua MPR RI dan belum mencabut dukungannya terhadap Abdurrahman Wahid.

---

<sup>49</sup> Lihat Untung Wahono, *Cemerlangnya Poros Tengah*, Jakarta; Perennial Pers, 1999, hal 86-88.

Setelah Amien Rais menolak, pilihan Poros Tengah berikutnya adalah Abdurrahman Wahid. Apalagi secara politik keikutsertaan PKB memperkuat kekuatan Poros Tengah menegaskan bahwa pencalonan Abdurrahman Wahid oleh Poros Tengah bukanlah faktor kebetulan. Bahkan dapat dikatakan bahwa Abdurrahman Wahid sebagai figur yang sangat mengakar di PKB maupun di NU telah aktif memainkan skenarionya dirinya di dalam Poros Tengah. Amien Rais yang kemudian terpilih sebagai Ketua MPR dan Abdurrahman Wahid yang kemudian dicalonkan oleh Poros Tengah adalah dua tokoh yang aktif menolak B.J. Habibie. Oleh karena itu dapat dipahami jika kemudian muncul isu, setelah B.J. Habibie mundur dari pencalonan Presiden, bahwa skenario Poros Tengah adalah menaikkan Abdurrahman Wahid sebagai Ketua MPR dan memajukan Amien Rais sebagai calon presiden.

Namun terpilihnya Amien Rais sebagai Ketua MPR dan terpilihnya Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR membuat situasi berkembang lain, sehingga memaksa skenario Poros Tengah berubah. Mundurnya B.J. Habibie dari pencalonan Presiden dan terpilihnya Amien Rais sebagai Ketua MPR, serta terpilihnya Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR adalah situasi yang sangat menguntungkan posisi politik Abdurrahman Wahid. Sebab, satu-satunya pilihan skenario Poros Tengah adalah mendukung Ketua Umum PKB Abdurrahman Wahid bersaing dengan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri. Tentang terpilihnya pencalonan dan terpilihnya Abdurrahman Wahid, Akbar Tanjung mengatakan:

“Golkar awalnya memberi dukungan pada Pak Habibie pada pemilu Presiden tahun 1999. Tapi karena Pak Habibie pertanggung jawabannya ditolak tadi dengan beberapa alasan tadi, Pak Habibie boleh menyatakan tidak lagi berkeinginan untuk maju sebagai Calon Presiden karena dia berpendapat bahwa secara politik dia sudah tidak dapat dukungan kuat di MPR karena laporan pertanggungjawabannya ditolak. Walaupun sebetulnya Golkar sendiri tetap memberikan dukungan kepada Pak Habibie bahkan Golkar tetap mendorong Pak Habibie untuk tetap maju karena kalau pertanggungjawaban satu soal, soal pemilihan Presiden soal lain, bisa saja kita kembali untuk memberikan dukungan kepada Pak Habibie tapi Pak Habibie tetap pada pendiriannya dan dia tidak maju. Bahkan waktu itu awal awalnya dia meminta saya untuk maju sebagai Calon Presiden dari Partai Golkar. Awalnya memang Pak Amien Rais tapi Pak Amien Rais sudah komit kepada Gus Dur maka dia juga tidak mau. Dia juga minta saya, Pak Habibie bahkan dia pesan berkali-kali dia minta saya, tapi saya

melihat situasi internal partai tidak memberi dukungan kepada saya karena ada kecurigaan-kecurigaan di *intern* partai terhadap ditolaknya pertanggungjawaban Pak Habibie, dianggap orang-orang intern partai tidak sungguh-sungguh mendukung Pak Habibie termasuk saya sebagai Ketua Umum dianggap tidak sungguh-sungguh mendukung Pak Habibie sehingga saya mengatakan kepada Pak Habibie kalau saya maju saya khawatir internal partai nanti bisa pecah dan itu tidak baik untuk partai karena saya pada saat itu sangat butuh soliditas partai, karena pada waktu itu partai sedang mengalami tekanan-tekanan berat, kejahatan-kejahatan, bahkan teror, dan akhirnya komprominya Gus Dur. Bahwa Golkar juga Gus Dur nah di situlah Poros Tengah juga memberikan Gus Dur dan akhirnya terpilih lah.”<sup>50</sup>

Setelah Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden, muncul empat nama yang siap mengisi posisi Wakil Presiden, yaitu: (1) Akbar Tanjung; (2) Megawati Soekarnoputri; (3) Wiranto; (4) Hamzah Haz. Kemunculan empat nama itu membuat pemilihan Wakil Presiden berjalan cukup alot, sehingga baru pada Kamis, tanggal 21 Oktober 1999 jam 14.00 WIB, Rapat Paripurna MPR dimulai. Beberapa saat setelah dibuka, Akbar Tanjung melakukan interupsi menyatakan pengunduran dirinya dari pencalonan. Lalu disusul Amien Rais yang membacakan surat pengunduran diri Wiranto dari bursa pencalonan, hingga akhirnya tersisa dua calon, yaitu Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz. Setelah dilakukan *voting* tertutup, Megawati Soekarnoputri berhasil memperoleh 396 suara dan Hamzah Haz hanya mendapat 284 suara. MPR kemudian menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden untuk periode 1999-2004 mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid.

Kurang lebih sama dengan pendahulunya yang tidak menikmati ketenangan di awal-awal pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid menghadapi masalah yang tidak dapat dibilang remeh sesaat setelah Kabinetnya terbentuk. Kebijakan Abdurrahman Wahid yang membubarkan Departemen Penerangan (Deppen) dan Departemen Sosial (Depsos) mendapat sorotan dari berbagai pihak terutama dari DPR. Selain itu, kebiasaannya yang sangat mudah mengeluarkan *statement-statement* politik tanpa mempertimbangkan reaksi yang ditimbulkannya dan perilaku politiknya yang sangat populis dan egaliter yang berdampak pada desakralisasi Lembaga Kepresidenan juga mendapat perhatian DPR. Meskipun kebijakannya itu cukup penting untuk menumbuhkan budaya demokrasi dengan

<sup>50</sup> Wawancara dengan Akbar Tanjung di Jakarta pada tanggal. 17 Desember 2009

memberi ruang publik yang bebas bagi media massa dan sekaligus upaya pemberdayaan *civil society* yang selama ini dikooptasi negara, namun kebijakan itu tak ubahnya seperti menciptakan musuh baru bagi pemerintahannya.

Upaya Abdurrahman Wahid membela kebijakannya yang membubarkan Deppen dan Depsos melalui serangkaian dialog, tidak diterima oleh para karyawan Deppen dan Depsos. Pada tanggal 1 November 1999, ribuan karyawan Deppen mendatangi dan meminta kepada DPR agar Presiden Abdurrahman Wahid memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan pembubaran Deppen. Menindaklanjuti aspirasi ribuan karyawan Deppen dan Depsos, DPR melalui Sidang Paripurna tanggal 18 November 1999 mendengarkan penjelasan Presiden Abdurrahman Wahid mengenai alasan pembubaran Deppen dan Depsos. Pada hari itu juga di luar gedung DPR, ribuan pegawai Deppen dan Depsos melakukan aksi demonstrasi, dan di dalam gedung DPR terjadi ketegangan antara anggota DPR dengan Presiden Abdurrahman Wahid. Namun DPR akhirnya bisa menerima jawaban Presiden Abdurrahman Wahid setelah ia menjelaskan bahwa kebijakannya itu diputuskan dengan melibatkan Amien Rais, Akbar Tanjung, Megawati Soekarnoputri dan beberapa lainnya di awal penyusunan Kabinet Pembangunan Nasional.

**Tabel 5.7:**  
**Partai Politik Pendukung dan Penentang Abdurrahman Wahid**

<b>Partai Politik Pendukung Abdurrahman Wahid</b>	<b>Partai Politik Penentang Abdurrahman Wahid</b>
1. PKB 2. Partai Demokrasi Kasih Bangsa	1. PDI-P 2. Partai Golkar 3. PAN 4. PK 5. PPP 6. PBB

**Sumber:** Diolah oleh penulis dari wawancara dengan Muhaimin Iskandar Sekjen PKB pada Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, wawancara dengan Akbar Tandjung, Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR RI penentang Abdurrahman Wahid, Wawancara dengan Bachtiar Chamsjah (PPP) penentang Abdurrahman Wahid.

Masalah berikutnya adalah kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid yang memberhentikan anggota Kabinetnya yang berasal dari partai besar yang mendukungnya. Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid yang memberhentikan

sejumlah menteri dan beberapa pejabat di lingkungan Sekretaris Kepresidenan dengan alasan yang tidak jelas dinilai oleh banyak kalangan sebagai kebijakan yang tidak populis. Hamzah Haz (PPP) yang sebelumnya ditekan mundur dan Muhammad Jusuf Kalla (Partai Golkar) bersama Laksamana Sukardi (PDI-P) yang diberhentikan dengan alasan terlibat korupsi memicu konflik lanjutan antara Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR. DPR yang mayoritas anggotanya dari PDIP, Partai Golkar dan PPP tidak puas dengan penjelasan Abdurrahman Wahid menggunakan hak interpelasi, yakni berupa hak DPR untuk meminta penjelasan pemerintah berkenaan dengan kebijakan yang diambilnya (Lihat Tabel 5.7).

Sidang Paripurna DPR pada tanggal Juni 2000 yang menyetujui dilakukannya hak interpelasi pada Sidang Paripurna DPR pada bulan Juli 2000 tidak hanya menyita konsentrasi Presiden Abdurrahman Wahid untuk melaksanakan agenda reformasi yang masih dituntut oleh kelompok-kelompok gerakan mahasiswa, tetapi juga memproduksi kelompok-kelompok politik baru yang tidak puas terhadap pemerintahannya. Pada Sidang Paripurna bulan Juli 2000 digelar, Abdurrahman Wahid tidak hadir dan hanya memberikan mandat kepada Sekretaris Negara, Djohan Effendi, untuk membacakan jawaban Abdurrahman Wahid tentang pertanyaan DPR. Di luar dugaan, suasana justru semakin tegang, karena selain tidak menjawab pertanyaan DPR tentang alasan pemberhentian ketiga anggota kabinetnya, Abdurrahman Wahid juga mempertanyakan keabsahan hak interpelasi yang digunakan oleh DPR yang menurutnya tidak dikenal dalam sistem pemerintahan Presidensial. Namun kesediaan Abdurrahman Wahid meminta maaf kepada Ketua DPR, Akbar Tanjung, setidaknya meredakan ketegangan politik memasuki Sidang Tahunan MPR pada bulan Agustus 2000.

Kurun waktu bulan Oktober 1999-Agustus 2000, aksi-aksi dari gerakan mahasiswa masih terbilang sepi dan hanya terbatas pada upaya mahasiswa mengingatkan Abdurrahman Wahid tentang pentingnya pemerintah memperhatikan agenda reformasi. Namun pasca Sidang Tahunan MPR bulan Agustus 2000, aksi-aksi gerakan mahasiswa mulai marak terutama setelah DPR kembali berseteru dengan Abdurrahman Wahid dalam kasus penyalagunaan dana milik Yayasan Yanatera Badan Urusan Logistik (Bulog) dan kasus sumbangan

Sultan Brunei Darussalam yang populer dengan istilah *Buloggate* dan *Bruneigate* (Lihat Tabel 5.7). Abdurrahman Wahid yang dituding terlibat dalam *Buloggate* dan *Bruneigate* mendorong 236 anggota DPR mengusulkan menggunakan Hak Angket kepada DPR dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki *Buloggate* dan *Bruneigate* yang kemudian dibahas dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 28 Agustus 2000.<sup>51</sup> Tentang maraknya aksi-aksi kelompok gerakan mahasiswa yang meminta mundur Abdurrahman Wahid, Akbar Tanjung mengatakan:

”Saya tahu bahwa mahasiswa juga melakukan gerakan-gerakan yang menentang Gus Dur. Nah ini semuanya terbentuk, tercipta oleh karena iklim kebebasan, karena memang di Istana dimungkinkan pada jaman-jaman itu, tahun 1998-1999 dan sampai hari ini, karena itulah yang merupakan salah satu cita-cita atau tema yang diperjuangkan oleh reformasi. Kebebasan, penegakan hukum, penegakan HAM itulah tema-tema yang diangkat dalam reformasi pada waktu itu. Juga memang para mahasiswa sangat aktif melakukan gerakan-gerakan aksi untuk menentang berbagai hal yang dianggap tidak sesuai dengan visi dan idealisme para mahasiswa termasuk Gus Dur. Demikian pula Golkar, bahkan di beberapa tempat para mahasiswa atau beberapa tokoh atau kelompok-kelompok dari LSM-LSM melakukan demo-demo, membakar bendera-bendera Golkar. Suasana itu suasana yang sangat lumrah dalam era politik pada waktu itu, karena adanya iklim kebebasan. Jadi penentangan mahasiswa terhadap Gus Dur tentu dengan alasan-alasan mereka, tapi saya tidak begitu banyak tahu dengan mereka, karena pada waktu itu posisi saya lebih pinginnya terus mempertahankan eksistensi Partai Golkar.”<sup>52</sup>

Setelah melalui proses panjang dan alot, pada Rapat Paripurna DPR tanggal 29 Januari 2001, DPR menerima laporan hasil Pansus *Buloggate* dan *Bruneigate*. Dalam laporannya di depan Rapat Paripurna DPR, Pansus *Buloggate* dan *Bruneigate* menyimpulkan dua hal, yaitu: (1) Presiden Abdurrahman Wahid diduga berperan dalam pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog; (2) Presiden Abdurrahman Wahid inkonsisten dalam pernyataannya mengenai aliran dana dari Sultan Brunei.<sup>53</sup> Selanjutnya, di dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar pada tanggal 1 Februari 2001, DPR mendengarkan pandangan umum Fraksi-Fraksi atas laporan hasil kerja Pansus *Buloggate* dan *Bruneigate*. Beragam pandangan muncul, Fraksi PKB mempertanyakan dan menolak hasil kerja Pansus,

<sup>51</sup> Setelah melalui voting; 307 anggota DPR setuju penggunaan Hak Angket, 3 anggota DPR yang menolak dan 5 yang abstain, DPR lalu membentuk Pansus *Buloggate* dan *Bruneigate*.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Akbar Tanjung pada tanggal 17 Desember 2009 di Jakarta.

<sup>53</sup> Mahfudz Sidiq, *Ibid.*, hal.253.

sedangkan Fraksi Reformasi mengusulkan Sidang Istimewa MPR dan yang lainnya berupa pernyataan mencabut dukungannya dan meminta Presiden Abdurrahman Wahid mundur dari jabatannya. Setelah melalui perdebatan yang cukup alot, Rapat Paripurna DPR pada pukul 22.15 WIB akhirnya memutuskan memberikan Memorandum I kepada Presiden Abdurrahman Wahid. DPR berpendapat bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan dan TAP MPR No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).<sup>54</sup>

Presiden Abdurrahman Wahid sendiri dalam menanggapi Memorandum I DPR tampaknya percaya diri dan tidak khawatir akan dampak politiknya. Abdurrahman Wahid dengan rasa percaya dirinya lalu memberi mandat kepada Baharuddin Lopa untuk membacakan jawaban tertulisnya atas Memorandum I di hadapan Rapat Paripurna DPR tanggal 28 Februari 2001. Namun sebagian besar Fraksi menilai bahwa Presiden Abdurrahman Wahid telah menolak atau mengabaikan Memorandum I, sehingga dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 30 April 2001 kembali mengeluarkan Memorandum II.<sup>55</sup> Presiden diberi waktu satu bulan untuk memperhatikan Memorandum II sebelum Rapat Paripurna DPR berikutnya untuk mendengarkan pendapat akhir Fraksi-Fraksi tentang sikap Presiden Abdurrahman Wahid. Sebab, bila DPR dapat menerima maka Memorandum II dianggap selesai, dan sebaliknya bila DPR menolak maka DPR dapat mengundang MPR untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa.

Presiden Abdurrahman Wahid kemudian menjawab memorandum II DPR melalui surat yang ditujukan kepada Ketua DPR pada tanggal 29 Mei 2001. Dalam suratnya, Abdurrahman Wahid menegaskan dua hal pokok, yaitu: (1) landasan hukum Memorandum II tidak jelas; (2) berdasarkan TAP MPR Nomor III Tahun 1978 tidak ada keharusan bagi Presiden menjawab memorandum, mengingat sifatnya yang hanya berupa peringatan belaka. DPR yang bereaksi keras atas jawaban Presiden Abdurrahman Wahid itu dalam Rapat Paripurna ke-62 pada tanggal 30 Mei 2001 secara resmi meminta MPR untuk

---

<sup>54</sup> Mahfudz Sidiq, *Ibid.*, hal.253.

<sup>55</sup> DPR mengeluarkan Memorandum II untuk Presiden Abdurrahman Wahid setelah melalui voting dengan hasil 363 suara yang setuju, 52 suara yang tidak setuju, dan 42 suara yang abstain.

melaksanakan Sidang Istimewa MPR dengan agenda meminta pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid.<sup>56</sup>

Sidang Paripurna DPR itu sudah diwarnai oleh aksi demonstrasi ribuan yang mayoritas berasal dari Ormas dan LSM pendukung Presiden Abdurrahman Wahid di luar gedung DPR (Tabel 5.8). Pada tengah malam, massa pendukung Presiden Abdurrahman Wahid lalu bergerak dari depan gedung DPR menuju depan Istana Merdeka untuk melanjutkan aksi dukungannya. Besok harinya, tanggal 31 Mei 2001, Pimpinan MPR melakukan rapat dan memutuskan dua hal, yaitu: (1) Badan Pekerja MPR akan memulai rapatnya pada tanggal 1 Juni 2001 untuk mempersiapkan agenda Sidang Istimewa MPR; (2) Sidang Istimewa MPR berlangsung pada tanggal 1 Agustus 2001.

**Tabel 5.8:**  
**Ormas/LSM Pendukung dan Penentang Abdurrahman Wahid**

<b>Lembaga/Ormas/LSM Pendukung Abdurrahman Wahid</b>	<b>Lembaga/Ormas/LSM Penentang Abdurrahman Wahid</b>
1. PBNU	1. GPK
2. Walhi	2. BM PAN
3. Fordem	3. Pemuda Keadilan
4. GP Ansor	4. Pemuda Muhammadiyah
5. FNPBI	5. Laskar Jihad
6. FPPI	6. FPI
7. Garda Bangsa	
8. FAMPI	
9. STN	
10. JAKER	

**Sumber:** Diolah oleh penulis dari wawancara dengan Abdul Rojak (Garda Bangsa) dan dari media massa, *Kompas*, *Media Indonesia* dan *Koran Tempo*.

Keputusan pimpinan MPR itu membuat situasi politik semakin memanas. Selain demonstrasi-demonstrasi yang mendukung dan menentang Abdurrahman Wahid, juga di publik terdengar isu bahwa di kalangan anggota DPR mulai menawarkan berbagai skenario politik dan lobby-lobby politik untuk mempengaruhi jalannya Sidang Istimewa. Tentang aksi-aksi mahasiswa yang mendukung dan menentang Abdurrahman Wahid yang berkaitan dengan elit politik, Andre Rosiade, Aktivis BEM SI mengatakan:

<sup>56</sup> Keputusan DPR yang meminta Sidang Istimewa MPR diambil dengan voting suara tanpa keikutsertaan FPKB. 365 suara setuju, 4 suara yang menolak, dan 39 suara yang abstain.

”Pada awalnya kita mendukung pemerintahan Gus Dur. Jadi seluruh elemen bangsa, seluruh rakyat Indonesia sangat mendukung pemerintahan Gus Dur pada awalnya, tapi sesuai dengan perjalanan waktu kita melihat khususnya waktu sebagai mahasiswa, bahwa kita lihat Presiden pada waktu itu (Alm.) Abdurrahman Wahid gagal untuk mewujudkan cita-cita reformasi, banyak sekali kebijakan-kebijakannya yang aneh, yang bikin stabilitas politik carut-marut, lalu kebijakan-kebijakan pro-rakyatnya sangat lemah, waktu itu konflik antar masyarakat, kasus Ambon, Poso, Maluku itu menunjukkan kegagalan pemerintah memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kasus korupsi *Buloggate*, *Bruneigate* itu kan. Sehingga kita sepakat teman-teman mahasiswa kalau gak salah itu mulai November 2000 sejak mulai ada Kelompok Kaukus 11 November. Lalu teman-teman khususnya BEM yang anti Gus Dur ini dan yang menguasai struktur kepengurusan kemahasiswaan di universitas-universitas. Jadi kita sepakat waktu itu berdiskusi panjang lebar sepakat kita mencoba bersama sama untuk melakukan pergerakan untuk mengganti rezim yang ada pada waktu itu. Jadi kita mulai lah gerakan itu, mulai November konsolidasi, tapi yang jelas aksi-aksi yang dilakukan BEMSI pada saat itu terus terang kita kan di persepsikan dekat sama Akbar Tanjung, dipersepsikan dekat sama Amien Rais. Itu tidak benar, tapi koordinasi untuk narasumber kalau kita bikin seminar kita memang ya adalah diskusi-diskusi dengan Kaukus 11 November waktu itu.<sup>57</sup>

Pada hari yang sama, 31 Mei 2001 di Istana Merdeka, tempat Presiden Abdurrahman Wahid berkantor di Medan Merdeka Utara, sekitar pukul 23.00 WIB, Presiden Abdurrahman Wahid menerima kedatangan sembilan orang yang mewakili Koalisi Anti Orde Baru yang dipimpin oleh Thamrin Amal Tomagola, Dosen Ilmu Sosiologi Universitas Indonesia, meminta Presiden segera memberlakukan keadaan Darurat Sipil, membekukan DPR, dan mengembalikan kedaulatan rakyat melalui percepatan Pemilu. Hari berikutnya, tanggal 1 Juni 2001, Rapat Badan Pekerja MPR memberikan saran kepada pimpinan MPR bahwa Sidang Istimewa MPR dimulai 1 Agustus 2001 melalui Surat Keputusan BP MPR No.3/BP/2001 tanggal 9 Juli 2001 tentang Saran BP MPR kepada Pimpinan MPR RI.<sup>58</sup> Dalam surat itu juga, BP MPR menegaskan bahwa apabila terjadi perkembangan situasi dan kondisi yang semakin memburuk yang dapat mengancam keselamatan dan integritas bangsa dan negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari kebijakan dan tindakan Presiden, maka

<sup>57</sup> Wawancara dengan Andre Rosiade, Aktivist BEMSI, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, pada tanggal 25 Maret Jam 17.00Wib di Jakarta.

<sup>58</sup> Lihat Surat Keputusan BP MPR No.3/BP/2001 tanggal 9 Juli 2001 tentang Saran BP MPR kepada Pimpinan MPR RI dalam Arsip DPR/MPR tahun 2001.

Pimpinan MPR secepatnya mengundang anggota MPR untuk Rapat Paripurna MPR RI dalam rangka Sidang Istimewa MPR.

Rencana Sidang Istimewa MPR yang berlangsung pada tanggal 1 Agustus 2001 dan Pimpinan MPR yang dapat mengundang anggota MPR untuk Rapat Paripurna MPR RI dalam rangka Sidang Istimewa MPR adalah faktor yang memaksa Presiden Abdurrahman Wahid dan para pendukungnya untuk segera mengatasi keadaan dengan caranya sendiri. Terbukti selang sekitar delapan jam sebelum Sidang Istimewa MPR yang akan dimulai pada tanggal 1 Agustus 2001 pukul 09.05, Abdurrahman Wahid pada Senin dini hari Jam 01.10 Wib tanggal 31 Juli 2001 mengumumkan Maklumat Presiden RI yang dibacakan oleh Juru Bicara Kepresidenan Yahya Staquf yang terkenal dengan sebutan Dekrit Presiden untuk maksud menyelamatkan situasi politik yang tidak terkendali.

Sebelum isi dari Dekrit dibacakan Juru Bicara Kepresidenan Yahya Staquf, Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan, keputusan itu dipicu pernyataan Ketua MPR Amien Rais yang menyatakan bahwa sebentar lagi akan ada pemimpin nasional yang baru. "Itu artinya mereka tidak dapat mengendalikan orang-orang yang ingin memaksa saya turun dari jabatan Presiden. Kalau saya diturunkan, maka beberapa Provinsi akan melepaskan diri dari NKRI. Padahal saya disumpah untuk menjaga keutuhan teritorial. Karena itu dengan berat hati, selaku Panglima tertinggi angkatan perang saya memberlakukan Dekrit,"<sup>59</sup>

Dekrit Presiden itu berisi tiga hal penting, yaitu: (1) Membekukan MPR dan DPR RI; (2) Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pemilu dalam waktu satu tahun; (3) menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Maklumat Presiden itu juga memerintahkan kepada jajaran TNI dan Polri untuk mengamankan langkah-langkah penyelamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan menjalankan kehidupan sosial ekonomi seperti biasa.

---

<sup>59</sup> Lihat *Presiden Berlakukan Dekrit*, dalam *Kompas*, Senin, 23 Juli 2001.

Namun sesaat setelah Abdurrahman Wahid mengumumkan Dekrit, Pimpinan Fraksi MPR langsung mengadakan rapat kilat dan menegaskan kepada media massa bahwa Sidang Istimewa MPR tetap dilaksanakan. Penegasan Pimpinan Fraksi MPR diperkuat oleh Fatwa Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Maklumat yang dikeluarkan oleh Abdurrahman Wahid tidak sah. Juga TNI dan Polri tidak berada di pihak Presiden, sehingga tidak mendukung pelaksanaan isi Dekrit. Namun sikap TNI terhadap dekrit Presiden ini terbelah meski secara institusi komando TNI menolak dekrit tersebut, Letjend. (Purn) Agus Widjojo, Kaster TNI pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid mengatakan:

“Di sini ada *mix attitude* yah, sikap yang bercampur. Di satu sisi, TNI diwakili oleh Panglima TNI yang betul-betul ingin mencari sebuah posisi yang netral, terlepas dari politik, ini terbukti dari berbagai pernyataan Panglima TNI, yang mengatakan, masalah Dekrit adalah masalah politik. TNI berharap masalah politik ini bisa diselesaikan oleh para elit politik, tanpa harus menimbulkan krisis politik. Semangatnya adalah bukan TNI yang menyelesaikan, TNI tidak ikut menyelesaikan tetapi TNI punya harapan karena TNI sudah lepas dari politik. Tetapi ada kerancuan dari pernyataan Kepala Staff Angkatan Darat, Jendral Endriartono Sutarto, dengan mengatakan TNI AD menolak Dekrit Gus Dur. Walaupun menolak, tapi sikap menolak itu sebetulnya masih melibatkan diri dalam politik. Jadi transisi itu masih tajam dan terkadang membingungkan, tapi era Gus Dur ini memang penuh dengan cobaan dan hujatan bagi TNI.”<sup>60</sup>

Sikap TNI yang terbelah terhadap dikeluarkannya Dekrit oleh Presiden Abdurrahman Wahid memang sudah kelihatan sejak awal sebelum Dekrit dikeluarkan, Minggu sore Pangkostrad Letjend. Ryamizard Ryacudu mengadakan apel kesiagaan dengan pengerahan pasukan dan menggelar puluhan panser di silang Monas. Adanya apel siaga yang dilakukan oleh Pangkostrad Letjend. Ryamizard Ryacudu, Letjend. (Purn) Agus Widjojo, Kaster TNI pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid menjelaskan bahwa pengerahan pasukan dan panser itu bukan keputusan TNI secara institusi:

“Bukan keputusan TNI. Saya hanya mempunyai informasi atau pengetahuan sekunder, yah karena saya terlibat langsung. Saya tanyakan ketika itu, “eh, ada apa ini, apakah betul moncong meriam dihadapkan ke Istana?”, “bukan, pak. Itu hanya apel persiapan pengamanan, karena ada informasi akan ada demo besar-besaran”. “Tapi kenapa Panglima Kostrad?

<sup>60</sup> Wawancara dengan Letjend. (Purn.) Agus Widjojo Kepala Staf Teritorial TNI Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Selasa, 22 Juni 2010.

Karena Panglima Kostrad itu tidak punya kewenangan operasional. Yang punya kewenangan operasional adalah Pangdam Jaya”. “Nyatanya disitu bukan punya Kostrad aja pak, ada Marinir AL, ada Paskhas dari AU”. Ini malah salah lagi, karena Pangkostrad tidak punya kewenangan yang menjangkau ke TNI AL dan ke TNI AU. Harusnya kalau Pangkostrad ingin mengadakan pengecekan persiapan, yah dihalaman Kostrad aja. Jangan di luar, kalau di luar yah jangan melibatkan unsur-unsur yang berada di luar kewenangannya. Memang sepertinya ada yang menggosok-gosok, yang seakan ingin menunjukkan bahwa TNI AD tidak setuju bahwa Gus Dur ingin membubarkan DPR dengan adanya apel di Monas, dan arahkan moncong meriam ke Istana seperti Pak Nas tahun 1952, mungkin terpengaruh ini. Inilah yang saya katakan bahwa tafsiran posisi baru TNI melepaskan diri dari politik masih campur aduk, dan yang paling kental untuk menolak atau melepaskan diri dari politik adalah Markas Besar TNI. Yang pada saat itu sangat jelas terlihat dari pernyataan-pernyataan panglima TNI di Cilangkap, Markas Besar TNI sudah jelas dan tajam untuk mendukung posisi baru TNI untuk tidak terlibat dalam politik beda dengan TNI AD yang masih terpengaruh oleh romantisme politik terutama untuk berperan dalam politik.”<sup>61</sup>

Ketegangan yang terjadi di sekitar Presiden menjadi jelas, setelah Menkopolsoskam yang baru, Agum Gumelar memberikan keterangan pers di kantornya Medan Merdeka Barat. Agum Gumelar mengungkapkan ketegangan pembicaraan antara dirinya dengan Presiden dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Marzuki Darusman dan Pangab Jenderal Widodo AS, karena desakannya agar Abdurrahman Wahid membatalkan niatnya mengumumkan negara dalam keadaan bahaya dan membekukan MPR ditolak keras oleh Abdurrahman Wahid. Tentang kebijakan Abdurrahman Wahid yang mengeluarkan Dekrit dan membekukan DPR, Akbar Tanjung mengatakan:

”Terhadap tindakan Gus Dur mengeluarkan Dekrit atau Maklumat itulah kemudian saya sebagai ketua DPR mengambil tindakan dan langkah-langkah. Dekritnya itu dikeluarkan pada malam hari pada Jam 12. Pada malam itu juga, saya sebagai Ketua DPR langsung mengambil tindakan, mengambil langkah-langkah untuk meminta Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa hukum terhadap tindakan Gus Dur mengeluarkan Dekrit atau Maklumat. Dimana dalam surat itu sekaligus juga selaku Ketua DPR bahwa tindakan Gus Dur itu bertentangan dengan konstitusi namun untuk mendapatkan kepastian hukum maka kami minta Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa hukum. Surat itu saya kirim juga tengah malam sekitar jam 1. Alhamdulillah Mahkamah Agung juga segera merespon dan saya juga berkomunikasi dengan Pimpinan Mahkamah Agung dalam hal ini Pak Bagir

<sup>61</sup> Wawancara dengan Letjen (Purn.) Agus Widjojo Kepala Staf Teritorial TNI Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid di Jakarta tanggal 22 Juni 2010.

Manan. Pak Bagir Manan dan anggota Hakim Agung lainnya juga segera merespon dan segera mereka juga melakukan pertemuan rapat dini hari. Setelah hasil dari pertemuan mereka, *Alhamdulillah* pagi hari kami sudah tahu yang intinya bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa tindakan Gus Dur itu bertentangan dengan hukum. Tidak ada kewenangan Gus Dur untuk membekukan, membubarkan organisasi politik, karena itu bukan kewenangan dari Presiden apa lagi misalnya membekukan DPR”<sup>62</sup>

MPR yang menggelar Sidang Istimewa MPR tidak dihadiri oleh Presiden Abdurrahman Wahid, padahal Sidang Istimewa MPR telah mengagendakan pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid. Sidang Istimewa MPR tanggal 1 Agustus 2001 akhirnya melahirkan empat ketetapan, yaitu: (1) TAP MPR No. I Tahun 2001 tentang Sikap MPR terhadap Maklumat Presiden RI tanggal 23 Juli 2001 yang memutuskan bahwa Maklumat tersebut tidak sah karena bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum; (2) TAP MPR No.II Tahun 2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden RI Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI dan mencabut serta menyatakan tidak berlaku lagi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden RI; (3) TAP MPR No. III Tahun 2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI; (4) TAP MPR RI No. IV Tahun 2001 tentang Pengangkatan Wakil Presiden RI, yaitu Hamzah Haz.<sup>63</sup>

Berbeda dengan kejatuhan Soekarno, Soeharto dan B.J. Habibie yang tidak dapat dilepaskan dari tekanan (*pressure*) gerakan mahasiswa yang memiliki kepentingan ideologi dan kepentingan politik, kejatuhan Abdurrahman Wahid dapat dikatakan bukan karena tekanan (*pressure*) kuat dari gerakan mahasiswa. Sebab, selain naiknya Abdurrahman Wahid hingga menjelang berlangsungnya Sidang Istimewa MPR tanggal 1 Agustus 2001 masih terjadi pro-kontra di kalangan gerakan mahasiswa, juga naik dan jatuhnya Abdurrahman Wahid lebih banyak diperankan oleh elit partai politik di DPR. Polarisasi di kalangan gerakan mahasiswa sangat dipengaruhi oleh interaksinya dengan elit-elit politik pendukung dan penentang Abdurrahman Wahid baik langsung maupun tidak langsung. Saling tuding menuding antara gerakan mahasiswa tentang adanya elit

<sup>62</sup> Wawancara penulis dengan Akbar Tanjung pada tanggal 17 Desember 2009 di Jakarta.

<sup>63</sup> Mahfudz Sidiq, *Ibid.*, hal.261.

politik yang menunggangi gerakannya setidaknya dapat menjadi petunjuk tentang adanya pengaruh elit politik dalam gerakan mahasiswa. Andre Rosiade, Aktivist BEMSI, mengatakan:

“Elit yang dipersepsikan oleh teman-teman yang pro Gus Dur, bahwa teman-teman pro Gus Dur menganggap gerakan BEMSI di tunggangi oleh Golkar, ditunggangi oleh Amien Rais. Bahkan kami di kampus dipersepsikan bahwa si Andre kaya raya dapat uang dari Akbar Tanjung, Taufik Riyadi kaya raya. Kan, yang sasaran tembak kalau di Jakarta kan kita berdua. Itu gak benar! Jadi aksi-aksi kita murni memang gerakan rakyat. Kita buka posko, BEMSI buka posko di UI, jadi kita menerima siapapun yang mengantarkan bantuan kepada gerakan kita. Tapi informasi yang saya dapatkan teman-teman yang jaga posko sempat menolak bantuan dari Cendana.”<sup>64</sup>

Tudingan bahwa aksi-aksi BEMSI yang menentang Abdurrahman Wahid yang berkaitan dengan elit politik, Adian Napitupulu, Aktivist FORKOT mengatakan:

“*Pertama*, saya tidak melihat mereka sebagai organ gerakan mahasiswa. Mereka adalah gerakan politik di level mahasiswa. *Kedua*, mereka punya jaringan politik melalui senior-senior mereka yang sudah mapan, sudah lama dalam partai dan sebagainya, dan mereka punya logistik yang jauh lebih besar dari pada kita, mereka punya struktur organisasi yang lebih kuat dibandingkan kita. Yang mereka tidak miliki adalah independensi. Kecenderungannya adalah mereka menjalankan strategi dan taktik partai.”<sup>65</sup>

Selain itu upaya elit partai politik mempengaruhi dan menarik simpati gerakan mahasiswa dengan cara memberi bantuan dana untuk kebutuhan operasional juga dilakukan melalui perantara (*broker*) hal ini diakui oleh Taufik Riyadi, Aktivist BEMSI, mengatakan:

“Seingat saya ada Arifin Panigoro yah, pada saat itu, kemudian dari PAN ada, saya lupa namanya. Jadi gini, waktu ketemu, saya bilang gini, saya gak bisa terima langsung itu, langsung ke UI aja. Jadi banyak yang mengatasnamakan LSM, mungkin, kalau saya logikanya begini saja, udah nih, saya udah bilang Mas Taufik, jadi di drop ke saya gitu loh, itu yang terjadi banyak perantara nya, ada brokernya gitu loh, itu terjadi, ada beberapa brokernya. Makanya setelah selesai ini, saya di bilang, oh Tori udah kaya raya itu. Jadi pernah sekali, ada orang sekali datang bawa koper, mungkin isinya sekitar Rp. 1 M, katanya ini saya musti langsung ke Mas

<sup>64</sup> Wawancara dengan Andre Rosiade, Aktivist BEMSI, Presiden Mahasiswa Trisakti pada tanggal 25 Maret di Jakarta.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Adian Napitupulu Aktivist FORKOT, Mahasiswa UKI, Tanggal 29 Mei 2010 di Jakarta.

Taufik, tapi dia gak mau kasih tahu dari mana. Tapi saya bilang langsung aja ke UI, nanti kan itu akan kita audit, kita ingin transparan. Tapi mengenai bantuan elit banyak lah, ada yang sekedar minta kontak saya, ada yang mengundang ke Hotel seperti Bachtiar Chamsjah, minta saya ke Hotel Crown dan disana sudah penuh, ada Hatta Rajasa, ada Ali Marwan Hanan, jadi menteri semuanya itu, kan. Tapi saya gak datang, yang datang sekjen saya, ternyata ada yang menjual nama saya, ada brokernya lah.”<sup>66</sup>

Upaya elit politik mendekati, mempengaruhi dan menarik simpati gerakan mahasiswa tidak hanya dilakukan dengan cara menawarkan kebutuhan operasional dalam melakukan aksi-aksinya, seperti bantuan dana dan bantuan logistik, tapi juga dilakukannya dengan cara mempertemukan gagasan dan pemikiran mereka melalui dialog atau diskusi-diskusi politik. Namun upaya mempertemukan gagasan dan pemikiran mereka melalui dialog atau diskusi-diskusi politik bukan semata-mata diprakarsai oleh elit politik. Adanya upaya elit partai politik mempengaruhi dan menarik simpati gerakan mahasiswa dengan cara memberi bantuan dana untuk kebutuhan operasional dalam melakukan aksi-aksinya, Arif Rahman, Aktivis BEMI, mengatakan:

”Bulan Juni itu, waktu di Atma Jaya bentrok, seingat saya, sejak awal bulan Juni, teman-teman dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, itu hampir kurang lebih 1500 orang, itu memang kumpul di beberapa titik kampus, ada di Tarumanagara, di Univ.Sahid, di Atma Jaya, juga di PB NU. Dan kita memang dari awal Juni nginap, puncaknya itu pada saat Gus Dur dijatuhkan, kita aksi di depan situ, kebetulan saya Korlap Nasional untuk mahasiswa, Korlap massa Cak Imin (Muhaimin Iskandar) dan Niam Salim. Saya yang mengkoordinir dan menampung dan memberikan logistik kepada teman-teman, tapi logistik itu bukan logistik sebagai bayaran, tapi sebagai makan. Kalau saya menerima uang atas rekomendasi Pak Muhyidin ke Gus Iim, itu saya menerima cuma Rp. 100.000.000,- di luar itu saya tidak tahu. Jadi begini, saya pisahkan dulu, bahwa dalam konteks itu ada yang namanya massa, bukan hanya mahasiswa saja yang saat itu nginap di Asrama Haji, memang sat itu saya yang membawa uang dengan Abdul Rozak. Itu dikasih di Hotel mana, saya lupa. Kurang lebih satu tas, dan itu diberikan untuk makan buat massa-massa yang dulu dianggap pasukan berani mati, juga massa dari Ansor, dari massa-massa NU yang lainnya yang menginap di Asrama Haji. Dulu juga, alasan kita meminta itu, karena saat itu memang banyak Korlap-Korlap dari daerah yang meminta sama kita, itu hanya untuk makan waktu itu. Karena memang ada ratusan ribu yang berkumpul di Asrama Haji, dan memang saya yang ditugaskan untuk memberikan makan ke massa-massa itu. Malam itu (uang) langsung habis, satu kali langsung habis. Kalau untuk BEMI, itu diberikan Gus Iim (Hasyim Wahid) sebanyak

<sup>66</sup> Wawancara penulis dengan Taufik Riyadi, aktivis BEMSI di Jakarta pada Kamis tanggal 01 April 2010 di Jakarta.

100 juta Rupiah, itu pun ada Abdul Rozak, Syafieq, ada Kahfie. Untuk tiap gerakan, dan itu kita anggap sebagai stimulus. Setelah itu, tugas masing-masing koordinator mencari di jaringannya masing-masing. Dan saya punya tugas untuk mencari di kelompok-kelompok Tionghoa yang memang saya kuliah di situ, dan saya tidak mengambil dari orang-perorang, tapi saya mengambil dari anggaran yang memang kita dapat dari Universitas Tarumanagara.<sup>67</sup>

Upaya elit partai politik mempengaruhi dan menarik simpati gerakan mahasiswa dengan cara memberi bantuan dana untuk kebutuhan operasional juga diakui oleh Andre Rosiade, Aktivist BEMSI, dengan mengatakan:

“Kalau soal elit, saya rasa setelah ini menjadi bola salju elit-elit pun mendekat ke kita, jadi memang yang pernah saya hadiri waktu itu kita pernah bertemu kelompok politik Kaukus 11 November di Hotel Darmawangsa, jadi kita berdiskusi. Anggota Kaukus 11 November, yang saya ingat Kwik Kian Gie, lalu dari Golkar, Ade Komarudin, lalu dari PPP, Bachtiar Chamsjah. Tapi yang saya ingat itu Kwik dan Ade pernah kita bertemu di Hotel Darmawangsa sekedar bertukar pikiran, berdiskusi. Tapi sepengetahuan saya dari aliran dana apakah ada secara logistik? Terus terang saya tidak menerima, karena setiap saya demonstrasi mekanisme yang saya hadapi di kampus saya tinggal minta duit ke Rektor, saya dapat. Jadi untuk membiayai bis sampai 7-10 bis Mayasari itu sudah cukup, lalu bis Mayasari 10 plus konsumsi logistik, beli aqua dan makan, 10 juta biasanya cukup itu, pada tahun 2001. Setiap demo memang disediakan pihak Rektorat, gak tau saya kampus-kampus yang lain. Lalu untuk posko utama kita buka bantuan, lalu buka posko jadi masyarakat begitu antusias melakukan sumbangan, jadi itu yang saya rasakan. Dukungan-dukkungan partai politik mungkin yah, karena massa itu begitu banyak saya perhatikan memang berasal dari ormas dan partai politik. Waktu saya bikin seminar pada bulan Januari 2001, pada hari pelantikan saya, saya bikin seminar soal kasus *Buloggate* yang dihadiri oleh Jusuf Kalla, Bambang Soedibyo dan Kwik Kian Gie. Memang ditawarkan bantuan, tapi saya bilang tidak usah Pak, saya hanya butuh narasumber hadir, karena untuk pembiayaan acara saya sudah cukup, saya tolak waktu itu. Tapi memang mereka menawarkan apa yang bisa dibantu, saya bilang tidak, karena saya ingin jelas, kita ingin jelas bahwa gerakan kita gerakan moral bukan gerakan yang di tungganggigi oleh partai politik.”<sup>68</sup>

Sama dengan tindakan BEMSI yang terbuka terhadap bantuan elit politik yang ingin berkerjasama dengan gerakan mahasiswa, BEMI yang mendukung Abdurrahman Wahid juga membuka ruang kerjasama dengan elit partai politik yang satu gagasan dan satu pemikiran dengan BEMI. BEMI tetap menerima

<sup>67</sup> Wawancara penulis dengan Arif Rahman, Aktivist BEMI dari Universitas Tarumanagara di Jakarta pada tanggal 02 April 2010.

<sup>68</sup> Wawancara penulis dengan Andre Rosiade, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti dan Aktivist BEMSI di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2010.

bantuan elit politik baik berupa dana maupun dalam bentuk logistik dari pihak-pihak terutama elit yang mendukung Abdurrahman Wahid. Arif Rahman, aktivis BEMI mengatakan:

”Kalau dari partai PKB ada, pro Gus Dur ada beberapa kelompok ya memang itu sama ide dan pemikirannya tentang demokrasi dan memang pilihannya terhadap Gus Dur. Nah itu bantuannya logistik bertahap apa sekali kasih. Jadi kalau misalkan dulu kita kan memang banyak ada kelompok-kelompok jaringan yang memberikan, misalkan dulu ada Suara Ibu Peduli itu hanya sifatnya logistik, tidak berupa uang. Kalau uang itu kan misalkan kita seperti melakukan pertemuan di Yogyakarta, selain kolektif dari kampus-kampus terutama dari kampus kaya, saya dari kampus Tarumanagara saya bisa kondisikan dari Yayasan Tarumanagara dan akhirnya kita di *backup* untuk berangkat dan membantu acara tersebut. Kita juga meminta dari beberapa orang yang kita anggap satu pemikiran satu ide dengan kita dan akhirnya mereka membantu kita dan sifatnya hanya kalau memang kita ada kegiatan kita minta bantuan, mereka bantu. Teman-teman yang di luar Jakarta seperti di kampus Yogyakarta, Surabaya, Jawa Timur itu, mereka datang untuk demonstrasi mendukung Gus Dur. Kalau teman-teman daerah kemarin itu kita tidak bantu, tapi karena memang solidaritas dari teman-teman mereka berangkat ke Jakarta menggunakan kereta maupun bis, mereka kita bantu pada saat di Jakarta saja dalam arti mereka butuh makan, mereka butuh yang lain, pada saat aksinya ya memang teman-teman Jakarta yang *support*.”<sup>69</sup>

Berbeda dengan aktivis BEMI yang mengakui adanya komunikasi dengan elit-elit politik yang menjadi patronnya karena memiliki kesamaan ide dan kepentingan politik, aktivis FORKOT menolak disebut komunikasinya dengan elit-elit politik yang menjadi ”mitranya” terjadi karena adanya transaksi politik. Eli Salomo, Aktivis FORKOT mengatakan:

”Jadi komunikasi politik dengan elit-elit politik tersebut itu terjadi tetapi apakah itu kemudian terjadi transaksi politik, kan bisa di cek dilapangan apakah kita memunculkan satu nama, dua nama, tau tiga nama. Misalnya peristiwa semanggi memang itu menjadi suatu peristiwa yang cukup besar dan kalau kita lihat begini premisnya kalau kita bicara tentang mahasiswa maka kita bicara tentang sekelompok anak muda yang punya intelektual yang punya gagasan dan intelektual dan dia adalah orang yang bisa menganalisis. Apakah sebodoh itu mereka tidak mampu menganalisis bahwa sekelompok elit pimpinan FORKOT melakukan deal politik dukungan politik kepada elit tertentu. Karena salah satu yang menjadi dorongan adalah

<sup>69</sup> Wawancara penulis dengan Arif Rahman, aktivis BEMI di Jakarta pada tanggal 28 November 2009.

kita tidak mau ditunggangi oleh elit politik tertentu di situ poinnyadan di situ juga yang menjadi kritik kita terhadap KAMMI.”<sup>70</sup>

Di satu sisi FORKOT menolak disebut komunikasinya dengan elit-elit politik yang menjadi ”mitranya” mengandung transaksi politik, tapi lain sisi tetap menuding kalau seterusnya itu, KAMMI, melakukan hubungan dengan elit politik penuh nuansa kepentingan politik. Eli Salomo, Aktivis FORKOT mengatakan:

”Kalau secara jujur mereka (KAMMI) harus mengatakan bahwa mereka tumpangan alat tumpangan dari elit-elit senior-senior mereka maupun dari alat tumpangan dari Habibie untuk bertahan. Hal inilah yang kita tolak dan bahwa kemudian terjadi banyak bantuan-bantuan dari beberapa elit politik kita mengakui misalnya kelompok Jengjala posnya Arifin itu sering melakukan bantuan misalnya dalam bentuk rotilah atau makanan. Atau Suara Ibu Peduli (SIP) atau misalnya dari gang X-ITB itu banyak tapi apakah di dalamnya terjadi transaksi? Sekali lagi aku minta bisa di cek dari program politiknya apakah memunculkan 2-3 nama menjadi kita dorong untuk menggantikan Habibie? Kan tidak! Bahwa peristiwa itu kemudian terjadi pertarungan besar mengakibatkan korban dan munculnya korban itu kan bukan dari skenario yang kita mau bahwa itu adalah satu eksekusi dari pemerintahan yang tidak mau berubah dari satu rezim yang tidak mau berubah sehingga dia mengerahkan satu kekuatan bersenjata melawan sekelompok orang yang tidak bersenjata sekelompok orang juga tidak terlatih.... Kalau, misal, kita dituduh mendukung PDI-P saat itu dengan kita kampanye besar-besaran sebenarnya kan di anak muda ini kan lebih mendekat kepada Megawati atau PDI-P dengan kita aksi kan banyak suara yang akhirnya golput. Itu merugikan kalau dalam transaksi politik itu kan merugikan seharusnya mengambil posisi yang kritis seperti yang dilakukan KAMMI dan kawan-kawannya saat Soeharto berkuasa.”<sup>71</sup>

Akibat pengaruh elit politik, gerakan mahasiswa kemudian terpolarisasi ke dalam dua gerakan, yaitu: (1) gerakan mahasiswa yang menuntut Abdurrahman Wahid mengundurkan diri; (2) gerakan mahasiswa yang tetap mengusung isu lama; anti Orde Baru dan pembubaran Partai Golkar. Gerakan mahasiswa yang menuntut Abdurrahman Wahid mengundurkan diri memiliki akses terhadap elit partai politik yang menjadi kekuatan Poros Tengah, seperti Megawati Soekarnoputri (PDI-P), Akbar Tandjung (Partai Golkar), Amien Rais dan Fuad Bawazier (PAN) dan Bachtiar Chamsjah (PPP). Padahal sebelumnya elit-elit

<sup>70</sup> Wawancara dengan Eli Salomo, Aktivis FORKOT penentang B.J. Habibie, Mahasiswa ISTN Jakarta, Sabtu, 28 November 2009, di Jakarta.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Eli Salomo, Aktivis FORKOT penentang B.J. Habibie, Mahasiswa ISTN Jakarta Sabtu, 28 November 2009.

partai politik tersebut justru berperan dalam menaikkan Abdurrahman Wahid menjadi Presiden. Sedangkan gerakan mahasiswa yang mengusung isu lama, seperti anti Orde Baru dan pembubaran Partai Golkar memiliki akses terhadap elit partai politik PKB. PKB sendiri merupakan satu-satunya partai politik yang konsisten membela Abdurrahman Wahid hingga kejatuhannya.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa: (1) unjuk rasa atau gerakan massa yang dilakukan oleh HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI adalah gerakan politik (2) kontak-kontak pribadi secara langsung dan lobby-lobby politik antara gerakan mahasiswa dan elit politik yang mendukung dan menentang B.J. Habibie dan yang mendukung dan menentang Abdurrahman Wahid menunjukkan adanya partisipasi politik baik dalam arti konvensional maupun dalam arti non-konvensional seperti yang dimaksud Gabriel Almond.<sup>72</sup> Akan tetapi lebih dari sekedar partisipasi politik, gerakan mahasiswa juga sudah termasuk ke dalam bagian dari gerakan sosial karena sudah merupakan upaya kolektif untuk memajukan atau melawan perubahan dalam sebuah masyarakat atau kelompok seperti yang dimaksud Nan Lin.<sup>73</sup>

Keterlibatan gerakan mahasiswa sebagai alat perjuangan dalam mendukung dan menentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid bukan hanya sekedar ingin berpartisipasi dalam politik sebagai interpretasi dari konsep pembangunan, tetapi lebih jauh lagi juga ingin memperlihatkan identitas mereka di dalam merealisasikan peran-perannya di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu bentuk-bentuk gerakan mahasiswa seperti aksi-aksi demonstrasi merupakan bentuk aktualisasi dari perannya sebagai agen perubahan sosial. Melalui aksi-aksi demonstrasi, HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI berusaha menyuarakan sikap moralnya. Bentuk-bentuk lain dari aktualisasi peran gerakan mahasiswa yang mendukung dan menentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid adalah memobilisasi massa mahasiswa dalam jumlah besar dan serentak, melakukan pendudukan atas bangunan pemerintah, seperti mengepung Istana dan menduduki gedung DPR/MPR.

---

<sup>72</sup> Gabriel Almond memasukkan kontak-kontak pribadi secara langsung dan atau lobby politik unjuk rasa atau demonstrasi dan gerakan sebagai unsur partisipasi politik Lihat Gabriel Almond dalam Mochtar Ma' oed dan Colin MacAndrews, *Op. Cit.*.

<sup>73</sup> Lihat Nan Lin, *Op. Cit.*, hal. 1880.

Adanya pengaruh dari elit politik dalam gerakan mahasiswa menyebabkan polarisasi gerakan mahasiswa, yaitu yang mendukung dan yang menolak B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid, sehingga semuanya berorientasi politik. Oleh karena itu adanya orientasi politik dalam aksi-aksi demonstrasi HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI menunjukkan tidak adanya gerakan moral (*moral movement*). Sebab, gerakan moral yang dimaksud Muridan S. Widjojo hanya sebatas menghimbau dan mengingatkan, menyuarakan kebenaran universal, memperjuangkan HAM, menolak penindasan dan berbagai bentuk kesewenang-wenangan, dan bukan pada gerakan yang berusaha menjatuhkan kekuasaan.<sup>74</sup>

Begitu pula adanya pengaruh dari elit politik dalam gerakan mahasiswa menyebabkan tidak adanya gerakan mahasiswa yang berorientasi pada norma. Sebab, aksi-aksi demonstrasi HMI dan KAMMI yang mendukung B.J. Habibie dan aksi-aksi demonstrasi FORKOT dan FKSMJ yang menentang B.J. Habibie, serta aksi-aksi demonstrasi BEMI yang mendukung Abdurrahman Wahid dan aksi-aksi demonstrasi BEMSI yang menentang Abdurrahman Wahid semuanya tidak sekedar mengkoreksi kebijakan-kebijakan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid yang dianggap bermasalah, seperti KKN, referendum Timur-Timor, pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Sebaliknya, aksi-aksi demonstrasi HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI semuanya berorientasi pada nilai (politik), karena aksi-aksinya selain bertujuan memperjuangkan ideologi, juga sudah bermaksud mendukung dan menjatuhkan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid dengan dasar kebijakan yang salah atau bertentangan ideologi, seperti B.J. Habibie adalah orang Islam dan ICMI dan kebijakan Abdurrahman Wahid yang ingin membuka hubungan dengan Israel dan membebaskan tahanan politik yang terlibat komunis.<sup>75</sup>

Menggunakan tipologi Ali Ansori tentang gerakan moral dan gerakan nilai (politik), HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI tidak menggunakan gerakan moral sebagai pilihan bentuk aktualisasinya. Sebaliknya, HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI menggunakan gerakan politik sebagai pilihan bentuk aktualisasinya. Semua gerakan mahasiswa yang

<sup>74</sup> Lihat Muridan S. Widjojo, *Op.Cit.*, hal. 240.

<sup>75</sup> Lihat Suwondo, *Op.Cit.*, hal. 12.

mendukung dan menentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid memperlihatkan ciri: (1) orientasi yang ingin melakukan perubahan; (2) stigma gerakan moral hanya justifikasi dari kebenaran akademis; (3) penggunaan idiom demokrasi, HAM, supremasi sipil, supremasi hukum dan lain-lain yang hanya bermaksud menyentuh aspek psikologi, emosional, romantisme, dan bukan pada moral yang menjadi substansi dari gerakannya.

Oleh sebab itu meskipun gerakan politik merupakan hal yang tabu bagi mahasiswa, namun HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI justru tetap menggunakannya karena dipandang sebagai suatu jalan keluar yang praktis setelah mendapat pengaruh dari elit politik. Aksi-aksi demonstrasi HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI yang mendukung dan menentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid dalam pandangan Muridan S. Widjojo juga termasuk ke dalam gerakan politik karena dicirikan oleh dua hal, yaitu: (1) ruang pergerakan yang luas dan terbuka untuk berjuang bersama-sama rakyat; (2) upaya penyatuan berbagai kekuatan, termasuk dengan rakyat.<sup>76</sup>

Peran elit politik dalam aksi-aksi demonstrasi HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI, seperti bantuan dana untuk demonstrasi tidak hanya sekedar mempertajam polarisasi gerakan mahasiswa, namun juga membuat aksi-aksi demonstrasi HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI menjadi gerakan politik.

---

<sup>76</sup> Muridan S. Widjojo, *Op. Cit.*, 240.